



PEDOMAN PENULISAN TESIS

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOVA

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya buku panduan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Buku panduan ini merupakan revisi dari buku panduan sebelumnya yang selalu disempurnakan atas perkembangan kebutuhan persyaratan ilmiah yang saat ini menuntut perlu adanya penyesuaian.

Revisi panduan penulisan tesis ini agar memberikan arahan kepada mahasiswa dalam memilih sumber-sumber referensi yang baik, upaya akselerasi dalam mempercepat publikasi mahasiswa, rambu-rambu dalam melakukan sitasi/kutipan untuk menghindari terjadinya plagiarism dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi dan kemudahan dalam mengakses sumber referensi. Selain itu, saat ini diperlukan upaya adaptasi dengan perubahan jaman dalam pencapaian ilmu dan teknologi yang telah ada, sehingga karya ilmiah harus berisi pengembangan dan penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu disajikan dengan baik dan *compatible* dengan sajian-sajian karya ilmiah nasional dan internasional. Dengan demikian system penjaminan mutu akademik di program MAP terus dilakukan, terutama dalam tahap *input*, proses, *output* dan *outcome*.

Selaku koordinator program MAP, saya sangat menghargai kerja keras tim dalam melakukan revisi panduan penulisan karya ilmiah ini, semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lulusan dan bernilai ibadah untuk semua tim yang terlibat. Akhir kata semoga panduan ini dapat mempermudah dan memperlancar proses penyusunan karya ilmiah bagi mahasiswa.

Samarinda, 21 Oktober 2021
Koordinator Program MAP.



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 195903081984032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAGIAN I	1
A. Pedoman Umum	1
A.1. Pengertian	1
A.2. Tujuan.....	1
A.3. Materi	1
A.4. Kedudukan.....	2
B. Komisi, Kriteria, Uraian Tugas, Tahapan dan Penggantian Pembimbing Tesis.....	2
B.1. Komisi Pembimbing	2
B.2. Kriteria.....	2
B.3. Uraian Tugas.....	2
B.4. Tahapan.....	3
B.5. Penggantian Pembimbing	3
C. Prosedur, Prasyarat, Penyusunan, Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Tesis.....	2
C.1. Prosedur	3
C.2. Prasyarat.....	3
C.3. Penyusunan	4
C.4. Pelaksanaan Penelitian dan Proses Penulisan	4
D. Pasca Penelitian Dan Penulisan Tesis	4
D.1. Seminar Hasil Penelitian Tesis	4
D.2. Naskah Tesis Hasil Seminar	5
D.3. Ujian Tesis.....	5
D.4. Pelaksanaan Ujian Tesis	5
D.5. Penilaian Ujian Tesis	6
D.6. Hasil Ujian Tesis	6
D.7. Penyerahan Tesis	7
D.8. Publikasi Ilmiah Tesis	7
BAGIAN II.....	8
A. Pedoman Umum	8
A.1. Format Penulisan Tesis.....	8
A.1.1. Bagian Awal	8

A.1.2. Bagian Utama	9
A.1.3. Bagian Akhir Tesis	12
A.1. Format Penulisan Jurnal Ilmiah Bereputasi.....	13
B. Tata Cara Penulisan Tesis	13
B.1. Bahan dan Ukuran	13
B.2. Format Penulisan	13
B.3. Penomoran	15
B.4. Tabel dan Gambar.....	16
B.5. Bahasa.....	17
B.6. Istilah Baru dan Kutipan	17
Lampiran-lampiran	19
Contoh Publikasi Ilmiah Jurnal Bereputasi	

BAGIAN I

A. Pedoman Umum

A.1. Pengertian

Karya ilmiah disusun dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh mahasiswa program magister di bawah pengawasan pembimbing, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Karya ilmiah pada Program Magister Administrasi Publik berupa hasil penelitian yang disusun dalam bentuk Tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk menunjukkan adanya kemampuan dan sikap berpikir ilmiah secara mandiri dalam diri mahasiswa, sebagai tugas akhir dalam rangka pendidikan jenjang magister. Karya ilmiah ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan yang ditemukan dalam bidang yang menjadi kajian dalam program pendidikannya.

A.2. Tujuan

Memberikan mahasiswa kemampuan untuk :

- a. Menghayati asas-asas keilmuan sehingga dapat berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
- b. Menguasai dasar-dasar ilmu dan metodologi penelitian di bidang keahliannya sehingga dapat mengorganisasikan dan melaksanakan penelitian ilmiah.
- c. Memperluas dan memperdalam pengetahuannya dalam bidang dan materi penelitian.
- d. Mengkomunikasikan gagasan dan temuan ilmiah secara lisan dalam forum ilmiah dan secara tertulis dalam bentuk laporan yang sesuai dengan ketentuan.

A.3. Materi

Tesis berisi paparan hasil penelitian yang telah disusun berdasarkan metode keilmuan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan logis mengikuti suatu perspektif tertentu. Tesis dibagi menjadi lima bagian, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Penyajian Data dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

A.4. Kedudukan

Tesis memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya dengan bobot 6 sks yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis.

B. Komisi, Kriteria, Uraian Tugas, Tahapan dan Penggantian Pembimbing Penulisan Tesis

B.1. Komisi Pembimbing

Penyusunan Tesis dilaksanakan mahasiswa melalui arahan serta bimbingan dari komisi pembimbing yang terdiri atas ketua merangkap anggota dan satu orang anggota, yang ditunjuk oleh Koordinator Program Magister Administrasi Publik dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

B.2. Kriteria

Ketua dan anggota komisi pembimbing adalah dosen pada Magister Administrasi Publik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan atau memiliki kualifikasi pendidikan Doktor. Pembimbing I minimal menduduki jabatan fungsional Lektor, sedangkan Pembimbing II minimal menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli.
- b. Kompeten dalam bidang ilmu yang akan dihasilkan melalui Karya Ilmiah.
- c. Bersedia bertindak sebagai pembimbing mahasiswa yang bersangkutan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam uraian tugas komisi pembimbing yang dibuktikan dengan surat kesediaan menjadi pembimbing karya ilmiah.

B.3. Uraian Tugas

Komisi Pembimbing bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah.
- b. Dosen pembimbing mempertimbangkan saran penyempurnaan dari tim penguji pada setiap tahapan seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis.

B.4. Tahapan

Setelah mendapatkan surat penunjukan pembimbing, mahasiswa wajib melakukan proses pembimbingan paling lambat dua minggu sejak surat penunjukan yang dibagikan dengan catatan pada kartu konsultasi.

B.5. Penggantian Pembimbing

Penggantian pembimbing dapat dilakukan dengan persetujuan dan keputusan Koordinator Program MAP, melalui pertimbangan :

- a. Setelah minimal 1 (satu) bulan proses pembimbingan (konsultasi) baik dengan Pembimbing I ataupun Pembimbing II dan atau keduanya tidak ada perkembangan/kemajuan (dibuktikan dengan kartu konsultasi).
- b. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing secara tertulis setelah dikonfirmasi ke pembimbing oleh Koordinator Program MAP.
- c. Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila salah satu atau keduanya menyatakan tidak bersedia menjadi pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Penggantian dilakukan apabila pembimbing berhalangan tetap atau mendapat sanksi akademik dari Fakultas/Universitas.

C. Prosedur, Prasyarat, Penyusunan, Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Tesis

C.1. Prosedur

Tesis disusun oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik (minimal semester dua) dan syarat administratif, dengan mengikuti prosedur akademik untuk dipertanggungjawabkan dalam ujian tesis. Prosedur penyusunan tesis meliputi persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa, kegiatan pra penelitian, pelaksanaan penelitian, kegiatan pasca penelitian, dan pengaturan ujian tesis.

C.2. Prasyarat

Sebelum melaksanakan kegiatan pra penelitian untuk penyusunan tesis, mahasiswa harus memenuhi syarat :

- a. Dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah yang diberikan di semester dua.
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa (registrasi) pada semester tiga.

- c. Mahasiswa mengajukan usulan 3 (tiga) judul dan matrik design penelitian kepada Koordinator Program, dengan mengacu pada road map penelitian Magister Administrasi Publik.

C.3. Penyusunan

- a. Proposal penelitian disusun oleh mahasiswa dengan arahan dan bimbingan dari komisi pembimbing melalui konsultasi secara intensif.
- b. Format proposal penelitian sama dengan format tesis disertai jadwal pelaksanaan penelitian pada bagian akhir naskah proposal penelitian.
- c. Setiap proposal penelitian dan draft akhir Tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing, wajib dilakukan pengecekan similarity/plagiasi dengan nilai maksimal sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- d. Seminar proposal penelitian dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan pada point c di atas.

C.4. Pelaksanaan Penelitian dan Proses Penulisan

Penelitian dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan rencana penelitian dan arahan komisi pembimbing, setelah perbaikan seminar proposal penelitian. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan komisi pembimbing secara intensif dibuktikan dengan adanya kartu konsultasi.

D. Pasca Penelitian Dan Penulisan Tesis

D.1. Seminar Hasil Penelitian Tesis

- a. Seminar Hasil Penelitian adalah forum presentasi laporan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman bagi mahasiswa penyusun tesis bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis.
- b. Penelitian berikut seminar hasil penelitian adalah mata kuliah dengan bobot kredit 6 sks, dalam hubungan ini, seminar merupakan forum evaluasi hasil penelitian untuk menetapkan nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.

- c. Persiapan dan pelaksanaan seminar hasil penelitian diatur dengan prosedur dan tata cara yang sama dengan seminar proposal penelitian.
- d. Hasil penelitian selanjutnya dipresentasikan dalam seminar hasil penelitian dan dihadiri oleh minimal 4 orang yang terdiri dari 2 komisi pembimbing dan 2 Tim Penguji atau 1 Komisi Pembimbing dan 3 Tim Penguji.

D.2. Naskah Tesis Hasil Seminar

Setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian dengan bantuan komisi pembimbing dan saran dari Tim Penguji, mahasiswa merangkum materi laporan penelitian dan masukan penyempurnaan yang diperoleh dari peserta seminar, untuk selanjutnya disusun menjadi naskah tesis dengan format dan cara penulisan yang sesuai dengan pedoman penyusunan tesis ini.

D.3. Ujian Tesis

Ujian Tesis adalah ujian akhir program studi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis serta ilmu-ilmu pendukungnya.

D.4. Pelaksanaan Ujian Tesis

- a. Ujian Tesis bisa dilaksanakan setelah dilakukan pengecekan similarity/plagiasi dengan nilai maksimal sesuai dengan peraturan dari FISIP Universitas Mulawarman.
- b. Ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing, dilaksanakan secara tertutup dan disampaikan secara lisan tanpa menutup kemungkinan diberikan secara tertulis (Jika diperlukan).
- c. Ujian hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang penguji yang terdiri dari komisi pembimbing dan dua anggota dosen penguji yang telah ditetapkan atau satu pembimbing dan tiga orang tim penguji.
- d. Jadwal ujian ditetapkan oleh Koordinator Program MAP atas usulan dan saran dari komisi pembimbing dan penguji.
- e. Berdasarkan permohonan Komisi Pembimbing, Koordinator Program MAP menetapkan jadwal penyelenggaraan ujian tesis dan membuat undangan.
- f. Ujian dilaksanakan paling lama 120 menit.

D.5. Penilaian Ujian Tesis

- a. Penilaian dilaksanakan secara komprehensif terhadap materi ujian yaitu isi tesis dan ilmu-ilmu pendukungnya.
- b. Setiap penguji memberikan nilai komprehensif atas jawaban dan sanggahan mahasiswa.
- c. Nilai ujian tesis adalah nilai rata-rata dari semua nilai penguji yang mencakup draft tesis, penyajian tesis dan kemampuan mempertahankan tesis.
- d. Nilai ujian tesis dinyatakan dengan angka yang dikonversikan ke nilai huruf sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17

Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar Pasal 46 sebagai berikut :

Nilai Bobot Mata Kuliah Berdasarkan Angka Mutu

Angka Mutu (AM)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Huruf (NH)
$0 \leq AM < 40$	0,0	E
$40 \leq AM < 50$	1,0	D
$50 \leq AM < 60$	1,5	
$60 \leq AM < 65$	2,0	C
$65 \leq AM < 70$	2,5	
$70 \leq AM < 75$	3,0	B
$75 \leq AM < 80$	3,5	
$80 \leq AM \leq 100$	4,0	A

D.6. Hasil Ujian Tesis

- a. Hasil ujian tesis diumumkan oleh Ketua Komisi Pembimbing pada akhir ujian tesis.
- b. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diberikan kesempatan menempuh ujian ulangan satu kali dalam semester yang sama; jika tidak lulus dalam ujian ulangan tersebut, maka diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan kedua pada semester berikutnya. Apabila tidak lulus pada ujian ulangan kedua, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman.

- c. Tanggal kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis ditetapkan sebagai tanggal penyelesaian studi pada Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman.
- d. Laporan penilaian ujian tesis berupa Berita Acara Ujian dan Rekapitulasi Penilaian dibuat oleh Tim Penguji dan diserahkan kepada Koordinator Program MAP.
- e. Catatan perbaikan diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah tanggal ujian tesis dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan perbaikan dari penguji dan pembimbing.
- f. Yudisium akan dilaksanakan secara kolektif oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman setelah semua persyaratan akademik dan administratif diselesaikan.

D.7. Penyerahan Tesis

- a. Penyerahan tesis dilakukan setelah revisi akhir yang disetujui oleh komisi pembimbing, dan disahkan oleh Dekan.
- b. Tesis yang sudah disahkan oleh Dekan, diserahkan dalam bentuk *Hardcopy* sebanyak 3 eksamplar dan softcopy.

D.8. Publikasi Ilmiah Tesis

- a. Publikasi Ilmiah yang bersumber dari Tesis disesuaikan dengan *Guideline* jurnal tujuan.
- b. Publikasi ilmiah mahasiswa melalui *Open Journal System* (OJS) dengan bukti submit.
- c. Mahasiswa wajib melampirkan bukti hasil pengecekan similarity/plagiasi dari naskah jurnal dengan nilai maksimal sesuai dengan aturan dari FISIP Universitas Mulawarman.

BAGIAN II

A. Format Dan Tatacara Penulisan Tesis

A.1. Format Penulisan Tesis

A.1.1. Bagian Awal

Karya ilmiah tesis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1) Sampul

Pada sampul dicetak judul tesis; tulisan kata: tesis (huruf kapital); tulisan kalimat: Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister; lambang Universitas Mulawarman; nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa; tulisan: Program Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, tahun tesis. Contoh sampul tesis dapat dilihat pada (Lampiran 17). Sampul terdiri dari dua bagian: sampul luar menggunakan hard cover; dan sampul dalam menggunakan kertas A4 Biru 120 gram. Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, judul tesis dan tahun kelulusan. Cara penulisan punggung sampul dapat dilihat pada (Lampiran 18).

2) Halaman Judul

Halaman judul tesis berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, namun dicetak di atas kertas A4 putih 80 gram (Lampiran 17).

3) Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan memuat judul tesis, nama penulis, NIM, dan kata pengesahan, susunan dewan penguji dan tanda tangan dewan penguji dengan urutan: Ketua Komisi Pembimbing; Anggota Komisi Pembimbing; dan Pengesahan Dekan FISIP Universitas Mulawarman (Lampiran 19).

4) Halaman Identitas Tim Penguji

Halaman identitas tim penguji dicetak pada kertas A4 putih, memuat judul tesis, identitas mahasiswa, nama komisi pembimbing, dan nama tim dosen penguji, tanggal lulus dan SK penguji.

5) Halaman Pernyataan Orisinalitas

Halaman pernyataan orisinalitas merupakan halaman yang memuat ketegasan penulis bahwa naskah tesis bukan karya plagiasi dan menjamin orisinalitasnya yang ditanda tangani di atas materai.

- 6) **Riwayat Hidup**
Riwayat hidup berisi nama penulis, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta prestasi-prestasi yang pernah diraih.
- 7) **Halaman Persembahan**
Halaman persembahan berisi ucapan terima kasih kepada keluarga inti dan sponsorship (optional) (lampiran 25).
- 8) **Abstrak/Intisari**
Abstrak mencakup tujuan penelitian, metode dan hasil, disusun dengan jumlah maksimum 500 kata dan diketik satu spasi, disajikan dalam bahasa Indonesia.
- 9) **Abstract**
Sama dengan abstrak/intisari namun disajikan dalam bahasa Inggris.
- 10) **Kata Pengantar**
Kata pengantar memuat rasa syukur sehingga tulisan dapat disajikan, uraian singkat proses penulisan tesis dan penulis mengantarkan kepada pembaca agar dapat memahami isi tulisan, harapan: penyempurnaan, manfaat bagi yang membutuhkan (Lampiran 26).
- 11) **Daftar Isi**
Daftar isi memuat sistematika penulisan dan halaman penyajian (lampiran 31).
- 12) **Daftar Tabel**
Daftar tabel memuat judul tabel dan halaman (lampiran 27).
- 13) **Daftar Gambar**
Daftar gambar memuat nomor gambar, judul dan halaman (lampiran 28).
- 14) **Daftar Lampiran**
Daftar lampiran memuat grafik, dokumen riset (foto kegiatan penelitian) dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian (Peraturan Perundangan dan lain-lain).

A.1.2. Bagian Utama

Bagian utama tesis terdiri dari lima bab : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Penyajian Data dan Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka.

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

- a) Latar belakang penelitian berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih

permasalahan yang menarik, penting dan perlu diteliti.

- b) Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian.
- c) Tujuan penelitian berisi secara spesifik tujuan yang akan dicapai.
- d) Manfaat penelitian memberikan sumbangan baru yang diharapkan dari penelitian ini bagi perkembangan IPTEKS.

Bab II Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

- a) Penelitian terdahulu disajikan minimal sebanyak sepuluh jurnal yang terdiri dari tujuh jurnal nasional bereputasi dan tiga jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan tema penelitian.
- b) Uraian penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk matrik.
- c) Isi penelitian terdahulu meliputi: judul, nama penulis dan identitas jurnal, tujuan penulisan, metode (jenis penelitian, lokus, fokus dan analisis), persamaan dan perbedaan.
- d) Review penelitian terdahulu membandingkan kesesuaian penggunaan analisis dengan obyek penelitian (variabel dan fokus penelitian), penyusunan frame work penelitian. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitiannya belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian terdahulu.

2.2. Kerangka Teori

Berisi kerangka konsep, proposisi dan teori yang disusun oleh peneliti tentang permasalahan yang dikaji.

2.3. Definisi Konsep

Definisi konsepsional merupakan pembatasan pengertian dan pemaknaan abstraksi dari fakta yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu.

- a. Jenis Penelitian
- b. Jenis penelitian yang digunakan terdiri dari :
 - 1) Penelitian Kuantitatif
 - 2) Penelitian Kualitatif
 - 3) Kombinasi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
- c. Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)
- d. Definisi Operasional (Penelitian Kuantitatif)
- e. Jenis dan Sumber Data (Penelitian Kualitatif)
- f. Populasi dan Sampel (Penelitian Kuantitatif)
- g. Teknik Pengumpulan Data
- h. Teknik Analisis Data
- i. Instrumen Penelitian

Bab IV Penyajian Data Dan Pembahasan

4.1. Penyajian Data

- 4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
- 4.1.2. Karakteristik Responden
- 4.1.3. Penyajian Data berdasarkan fokus penelitian (kualitatif) dan definisi operasional (kuantitatif)
- 4.1.4. Analisis Data (kualitatif dan kuantitatif) dan Pengujian Hipotesis (kuantitatif)

4.2. Pembahasan

Interpretasi terhadap data yang disajikan dengan kerangka dasar teori dan penelitian terdahulu sehingga menghasilkan proposisi.

Bab V Penutup

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sintesis dari pembahasan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

- 5.1.1. Jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian
- 5.1.2. Hal baru yang ditemukan dan prospek temuan
- 5.1.3. Pemaknaan teoritis dari hal baru yang ditemukan

5.2. Saran

Saran merupakan implikasi dari hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi peneliti selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Daftar referensi dibuat dengan menggunakan aplikasi *Reference Manager Mendeley* menggunakan *American Psychological Association* (APA) style.

A.1.3. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir tesis adalah lampiran yang terdiri dari: hasil perhitungan statistik, kuesioner (penelitian kuantitatif), panduan wawancara (penelitian kualitatif), dokumentasi penelitian, peta dan data penunjang lainnya.

A.2. Format Penulisan Jurnal Ilmiah Bereputasi

Karya ilmiah dalam Jurnal ilmiah bereputasi menyesuaikan dengan format yang telah disediakan oleh masing – masing penerbit/publisher.

B. Tata Cara Penulisan Tesis

Tata-cara penulisan, meliputi: bahan dan ukuran, format penulisan, Penomoran, Tabel dan Gambar, Bahasa, Istilah Baru dan Kutipan.

B.1. Bahan dan Ukuran

Bahan dan ukuran mencakup: sampul (wama, tulisan, dan ukuran) serta naskah.

a. Sampul

Sampul dibuat dari kertas Buffalo wama biru dan dijilid *hardcover*. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.

b. Naskah

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m berwarna putih ukuran A4 (21 cm x 28 cm), dan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak-balik).

c. Kertas Pembatas

Antara bab yang satu dengan yang lain diberi kertas pembatas warna biru yang berlogo Universitas Mulawarman.

B.2. Format Penulisan

Penulisan menggunakan perangkat lunak komputer yang berkemampuan pengolah kata (wordprocessor), contoh: *Microsof Word*

a. Jenis huruf

- 1) Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (12 pt dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.
- 2) Kata asing dicetak dengan huruf miring (*italics*).
- 3) Lambang, simbol matematik, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang lain diketik dengan menggunakan fasilitas yang ada pada komputer.

b. Bagian dan satuan

- 1) Bilangan ditulis dengan angka, contoh: 2 Og, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya: Sepuluh ton.
- 2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, contoh: berat bahan 2,7 g.
- 3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya kg, mg, cal, dan lain-lain.

c. Jarak baris

Jarak antara dua baris dibuat 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi.

d. Batas tepi

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut.

- 1) Tepi atas: 4 cm
- 2) Tepi bawah: 3 cm
- 3) Tepi kiri: 4 cm
- 4) Tepi kanan: 3 cm

e. Alinea

baru

Alinea harus dimulai dengan jarak 1 tab atau 1,5 cm dari margin kiri.

f. Permulaan kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja, misalnya: Sepuluh ekor kelinci

g. Bab, subbab, anak subbab, dan subanak subbab

- 1) Bab harus dimulai pada halaman harus ditulis dengan huruf kapital, tebal (*bold*), dan simetris.
- 2) Subbab ditulis simetris. Awal kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah subbab dimulai dengan alinea baru.

- 3) Anak subbab diketik mulai dari batas kiri, ditulis tebal, dan hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak subbab dimulai dengan alinea baru.
 - 4) Subanak subbab ditulis dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris subanak subbab. Subanak subbab dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai subbab.
- h. Rincian ke bawah
- Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidaklah dibenarkan.
- i. Letak simetris
- Gambar, tabel, persamaan, bab, dan subbab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan penulisan.

B.3. Penomoran

Bagian ini menjelaskan penomoran halaman, tabel, gambar, dan persamaan.

- a. Halaman
 - 1) Bagian awal tesis, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil.
 - 2) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pengantar (Bab I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman.
 - 3) Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Nomor halaman untuk bah baru ditulis di sebelah kanan bawah.
 - 4) Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.
- b. Tabel

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan babnya.

c. Gambar

Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan babnya.

d. Persamaan

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain- lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung sesuai dengan babnya dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan.

B.4. Tabel dan Gambar

a. Tabel

- 1) Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik. Apabila judul tabel lebih dari satu baris, maka diketik satu spasi.
- 2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak mungkin disajikan dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata "Lanjutan", tanpa judul. Tabel ditulis simetris.
- 3) Kolom-kolom diberi nama dan pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.
- 4) Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, maka harus dibuat memanjang kertas, dengan bagian atas tabel diletakkan di sebelah kiri kertas.
- 5) Tabel yang lebih dari 2 (dua) halaman harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.
- 6) Tabel yang tidak cukup ditampilkan dalam satu halaman dapat ditulis dengan huruf Times New Roman minimal 8 pt.

b. Gambar

- 1) Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar.
- 2) Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. Apabila judul gambar lebih dari satu baris, maka diketik satu spasi.

- 3) Gambar disajikan secara utuh.
- 4) Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosongdi dalam gambar, jangan pada halaman lain dan dapat dibaca dengan jelas.
- 5) Bila gambar disajikan melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
- 6) Ukuran gambar proporsional.
- 7) Letak gambar simetris (kanan kiri).

B.5. Bahasa

a. Bahasa yang Dipakai

Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa yang benar (mengandung unsur subjek, predikat, dan objek).

b. Bentuk Kalimat

Kalimat dituliskan dalam bentuk kalimat pasif, dan tidak boleh menampilkan bentuk kalimat orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, engkau, dan lain- lainnya).

c. Istilah

- 1) Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di- Indonesiakan.
- 2) Jika harus memakai istilah asing, harus ditulis dengan huruf miring (*italics*).

B.6. Istilah Baru dan Kutipan

a. Istilah baru

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asalkan konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalaupun banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah (glosarium) di belakang.

b. Kutipan

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, diketik dua spasi menyatu dengan kalimat sebelumnya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (" ... "). Kutipan yang lebih dari tiga baris dimulai pada baris baru, diketik satu spasi menjorok ke dalam (sisi kanan dan kiri), tidak diterjemahkan, dan kutipan bahasa asing ditulis dengan huruf miring.

Lampiran 1

Contoh Formulir Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Nama : Arief Nurrahman
 N I M : 1902018001
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Judul Tesis : Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan
 Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19 Kota Samarinda
 Pembimbing I : Prof. Dr Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 Pembimbing Ii : Dr. Enos Paselle, M.AP
 Penguji I : Dr. Heryono Susilo Utomo,
 M.SiPenguji Ii : Dr. Bambang Irawan, M.Si
 Penguji Iii : Daryono, M.Si., Ph.D
 Hari/Tanggal :

Menyetujui
 Koordinator Program,

Samarinda, 10 Mei 2021
 Mahasiswa,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP. 195903081984032001
 1902018001

Arief Nurrahman
 NIM.

Lampiran 2

Contoh Undangan Seminar Proposal Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 10 Mei 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal Penelitian

Kepada Yth. : Dr. Heryono Susilo Utomo,, M.Si
(Komisi Pembimbing)
di -
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Proposal Penelitian mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
NIM : 1902018001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Semester : IV (empat)

Dengan ini mengundang Bapak/Ibu sebagai Pembimbing/Penguji Seminar Proposal Penelitian tersebut, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2021
Pukul : 16.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan agar Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma,
M.SiNIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 3

Contoh Pemberitahuan Seminar Proposal Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 10 Mei 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Seminar Proposal Penelitian

Kepada Yth. : Arief Nurrahman (1902018001)
Mahasiswa Program Magister Administrasi
Publik Konsentrasi Kebijakan Publik
Di –
Samarinda

Berdasarkan persetujuan seminar proposal yang saudara ajukan, saudara diminta hadir pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2021
Pukul : 16.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma,
M.SiNIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 4

Contoh Kartu Konsultasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KARTU KONSULTASI PENELITIAN
 UNTUK PENYUSUNAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Arief Nurrahman
 NurrahmanNIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi
 PublikKonsentrasi : Kebijakan Publik
 Komisi Pembimbing :

No.	Tanggal Konsultasi	Materi dan Catatan Pembimbing	Paraf Komisi Pembimbing
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Catatan:

Kartu Konsultasi ini dilampirkan pada saat Ujian Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis.

Lampiran 5

Contoh Lembar Revisi Seminar Proposal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul : Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan
 Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19 Kota Samarinda

No.	Nama Dosen	Saran-saran Perbaikan	Paraf Pembimbing dan Penguji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran 6

Contoh Formulir Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nama : Arief Nurrahman
 N I M : 1902018001
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Judul Tesis : Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan
 Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19 Kota Samarinda
 Pembimbing I : Prof. Dr Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 Pembimbing Ii : Dr. Enos Pabelle, M.AP
 Penguji I : Dr. Heryono Susilo Utomo,
 M.SiPenguji Ii : Dr. Bambang Irawan, M.Si
 Penguji Iii : Daryono, M.Si., Ph.D
 Hari/Tanggal :

Menyetujui
 Koordinator Program,

Samarinda, 10 September 2021
 Mahasiswa,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP. 195903081984032001

Arief Nurrahman
 NIM. 1902018001

Lampiran 7

Contoh Undangan Seminar Hasil Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 10 September 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan Seminar Hasil Penelitian

Kepada Yth. : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 (Komisi Pembimbing)
 di -
 Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Hasil Penelitian mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Semester : IV (empat)

Dengan ini mengundang Bapak/Ibu sebagai Pembimbing/Penguji Seminar Hasil Penelitian tersebut, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 September 2021
 Pukul : 16.00 Wita
 Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan agar Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 8

Contoh Pemberitahuan Seminar Hasil Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 10 September 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Seminar Hasil Penelitian

Kepada Yth. : Arief Nurrahman (1902018001)
Mahasiswa Program Magister Administrasi
PublikKonsentrasi Kebijakan Publik
Di –
Samarinda

Berdasarkan persetujuan seminar hasil penelitian yang saudara ajukan, saudara diminta hadir pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 September 2021
Pukul : 16.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 9

Contoh Berita Acara Seminar Hasil Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu sebelas bertempat di ruang ujian Program Magister Administrasi Publik Unmul Samarinda pada pukul enam belas telah dilaksanakan seminar hasil penelitian mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Judul : Perubahan Model Kebijakan Dinas
 Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19
 Kota Samarinda

PENILAIAN OLEH KOMISI		TANDA TANGAN
Ketua	: Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Enos Paselle, MAP	
Anggota	: Dr. Bambang Irawan, M.Si	
Anggota	: Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D	
Anggota	: Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si	

Samarinda, 19 September 2021

Komisi Pembimbing

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP. 19590308 198403 2 001

Dr. Enos Paselle, MAP
 NIP. 19740524 200501 1002

Mahasiswa,

Arief Nurrahman
 NIM. 1902018001

Lampiran 10

Contoh Lembar Revisi Seminar Hasil

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

LEMBAR REVISI SEMINAR HASIL TESIS

Nama Mahasiswa : Arief Nurrahman
NIM : 1902018001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul : Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19 Kota Samarinda

No.	Nama Dosen	Saran-saran Perbaikan	Paraf Pembimbing dan Penguji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran 11

Contoh Undangan Ujian Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 08 Oktober 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan Ujian Tesis

Kepada Yth. : Dr. Bambang Irawan, M.Si
 (Komisi Pembimbing)
 di –
 Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Tesis mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Semester : IV (empat)

Dengan ini mengundang Bapak/Ibu sebagai Pembimbing/Penguji Ujian Tesis tersebut, pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 11 Oktober 2011
 Pukul : 16.00 Wita
 Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan agar Bapak/Ibudapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP19590308 198403 2 001

Catatan:

1. Dosen penguji dimohon memakai dasi.
2. Mahasiswa memakai baju putih, berdas, danbawahan berwarna gelap.

Lampiran 12

Contoh Pemberitahuan Ujian Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 08 Oktober 2021

Nomor : /H 17.2/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Ujian Tesis

Kepada Yth. : Arief Nurrahman (1902018001)
Mahasiswa Program Magister Administrasi
PublikKonsentrasi Kebijakan Publik
Di –
Samarinda

Berdasarkan persetujuan Ujian Tesis yang saudara ajukan, saudara diminta hadir pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021
Pukul : 16.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannyadiucapkan terima kasih.

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 13

Contoh Berita Acara Ujian Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Penyelenggaraan Ujian Tesis dari mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik

Yang telah dilaksanakan pada

:Hari : Senin
 Tanggal : 11 Oktober 2021
 Pukul : 16.00 Wita
 Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Nilai :

Nama Dosen	Nilai Angka	Nilai (Huruf) ^{*)}
1. Ketua : Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
2. Sekretaris : Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si
3. Anggota : Dr. Bambang Irawan, M.Si
4. Anggota : Dr. Enos Paselle, MAP
5. Anggota : Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D
RERATA		

Catatan : Lulus / Lulus dengan syarat ^{**)} / Tidak Lulus ^{***)}

- **) Mahasiswa ditugaskan untuk memperbaiki Tesis
 ***) Mahasiswa harus mengulang Ujian Tesis,
 paling cepat 1 (satu) bulan setelah ujian pertama.

Samarinda, 11 Oktober 2021
 Tim Penguji
 Ketua,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
 NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 14

Contoh Rekapitulasi Penilaian Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

REKAPITULASI PENILAIAN TESIS

Penyelenggaraan Ujian Tesis dari mahasiswa :

Nama : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik

Yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 11 Oktober 2021
 Pukul : 09.00 Wita
 Tempat : Ruang Ujian 1 MAP

Nilai :

No.	Kegiatan	Bobot (B) (%)	Nilai (N)	B x N
1.	Proposal Penelitian	10		
2.	Penelitian	20		
3.	Seminar Hasil Penelitian	30		
4.	Ujian Tesis	40		
TOTAL (B x N)		100		
RERATA (BN x 100)				

Maka nilai Ujian Tesis dari mahasiswa tersebut di atas adalah.....*)

Samarinda,
Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 15

Contoh Surat Perjanjian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021, saya telah menempuh Ujian Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya berjanji untuk menyelesaikan segala masalah akademis dan menyerahkan Tesis yang telah disetujui oleh seluruh Komisi Pembimbing yang sudah dijilid selambat-lambatnya pada tanggal

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saya tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia diuji kembali dan membayar uang SPP.

Samarinda, September 2021

Arief Nurrahman
 NIM. 1902018001

Mengetahui :

Ketua : Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si

Sekretaris : Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si

Penguji 1 : Dr. Bambang Irawan, M.Si

Penguji 2 : Dr. Enos Paselle, M.Si

Penguji 3 : Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D

Lampiran 16

Contoh Lembar Revisi Ujian Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMAN

LEMBAR REVISI UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Arief Nurrahman
 NIM : 1902018001
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul : Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan
 Dan Catatan Sipil Di Era Covid-19 Kota Samarinda

No.	Nama Dosen	Saran-saran Perbaikan	Paraf Pembimbing dan Penguji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran 17

Contoh Sampul Depan Tesis

(Warna sampul biru tua D8 atau Linen, tulisan warna silver)

**PERUBAHAN MODEL KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPILDI ERA COVID-19 KOTA SAMARINDA**

T E S I S

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh :

Arief Nurrahman

NIM. 1902018001

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK KONSENTRASI

KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA

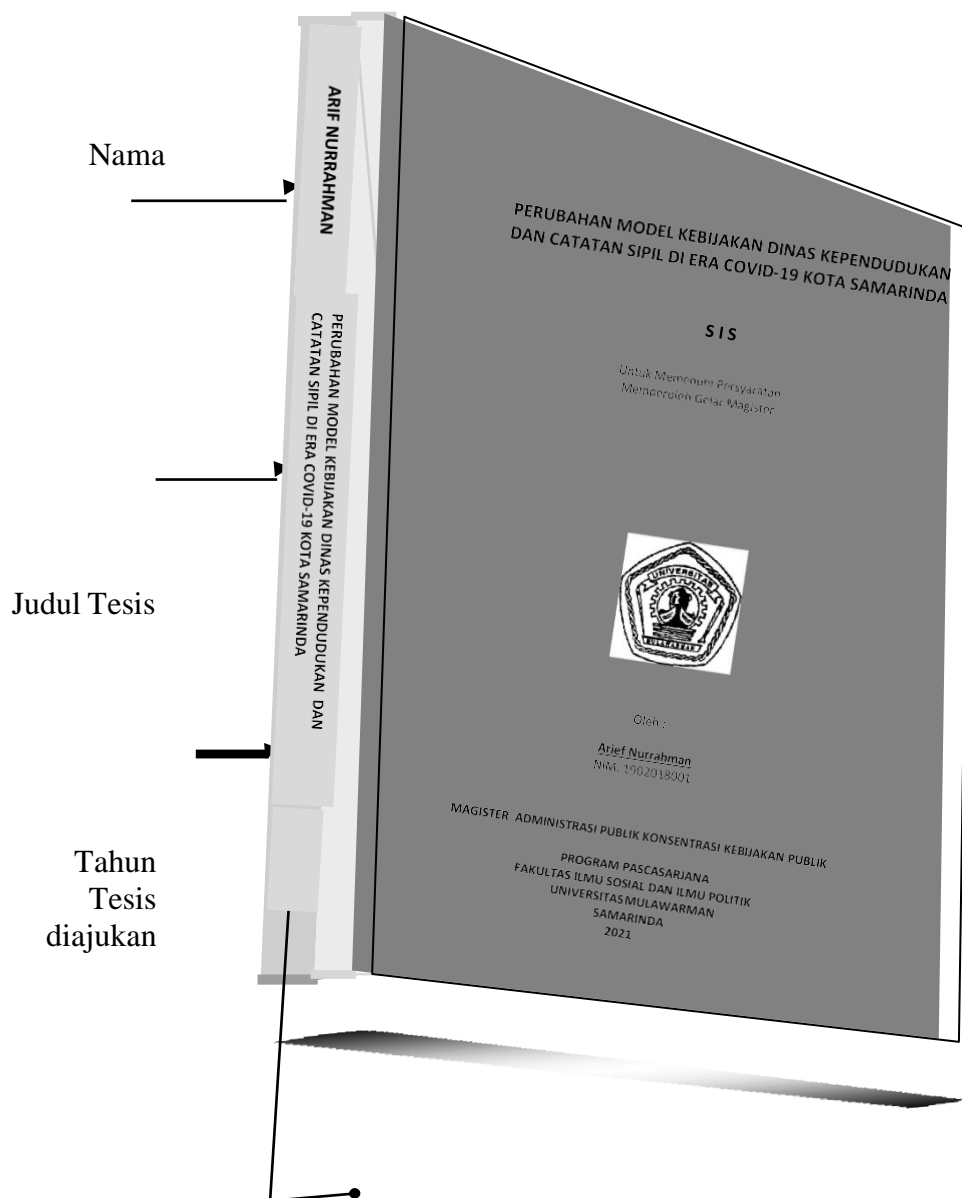
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK UNIVERSITAS

MULAWARMAN SAMARINDA

2021

Lampiran 18
Contoh Cara Penulisan Punggung Buku



Beri jarak 5 cm
Untuk label perpustakaan

Lampiran 19


Contoh Halaman Pengesahan Tesis

HALAMAN PENGESAHAN
PERUBAHAN MODEL KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPLDI ERA COVID-19 KOTA SAMARINDA

Oleh :

Arief Nurrahman

NIM. 1902018001



telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 11 Oktober 2021
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bambang Irawan, M.Si

NIP. 19760216 200501 1 002

Dr. Enos Paselle, MAP

NIP. 19740524 200501 1 002

Mengetahui :

Koordinator Program,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si

NIP. 19590308 198403 2 001

Lampiran 20

Contoh Halaman Identitas Tim Penguji Tesis

JUDUL TESIS:

**PERUBAHAN MODEL KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPILDI ERA COVID-19 KOTA SAMARINDA**

Nama Mahasiswa : Arief Nurrahman
NIM : 1902018001
Program Studi : Administrasi Publik Konsentrasi
: Kebijakan Publik

KOMISI PEMBIMBING :

Ketua : Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
Sekretaris : Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Bambang Irawan, M.Si
Dosen Penguji 2 : Dr. Enos Paselle, MAP
Dosen Penguji 3 : Daryono, S.Sos., M.Si.,
Ph.D

Tanggal Ujian : 11 Oktober 2021

SK Penguji : 021/UN17.2/OT/S2/2021

Lampiran 21

Contoh Pernyataan Orisinalitas Tesis


PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2009, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Samarinda, 11 Oktober 2021

Mahasiswa,



Materai
Rp. 10.000,-

Arief Nurrahman
NIM. 1902018001

Lampiran 22
Contoh Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Berisi:

Arief Nurrahman, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Agustus 1993 Putri dari ayah Muhammad Iqbal dan Ibu Nuraini. Pendidikan dasar hingga SMA di Kota Samarinda, lulus SMA pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, lulus pada tahun 2019. Pengalaman kerja sebagai pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Pasir 1985 hingga sekarang.

Samarinda, Oktober2021

Penulis

Lampiran 23

Contoh Intisari/Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Reformasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Akuntabilitas Governance melalui fokus penelitian yaitu: (1) Gambaran reformasi pelayanan publik IMB pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda, (2) Akuntabilitas Governance dari reformasi pelayanan publik IMB, (3) Implikasi reformasi pelayanan publik terhadap stakeholder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang reformasi pelayanan publik IMB dan akuntabilitas governance dari reformasi pelayanan publik serta implikasi reformasi terhadap stakeholder, yang telah dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya diadakan pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik IMB pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda dalam hal struktur dan prosedur birokrasi, dan sikap dan perilaku aparat telah diimplementasikan melalui: penggabungan dinas dan penghapusan eselon, pembentukan unit pelayanan terpadu, perubahan prosedur kewenangan, strategi jemput bola, sosialisasi pelayanan, dan sikap pelayanan. Sementara akuntabilitas governance dari reformasi pelayanan yang dilakukan meliputi akuntabilitas administratif, profesional, legal, politik, dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda telah melaksanakan akuntabilitas administratif, sedangkan akuntabilitas profesional dimaknai secara internal organisasi, akuntabilitas legal belum diterapkan secara konsisten dan masih bersifat retorika, akuntabilitas politik telah dilaksanakan namun masih bersifat seremonial, serta akuntabilitas moral belum dilaksanakan karena tidak ada pedoman yang mengaturnya. Selanjutnya implikasi reformasi pelayanan publik terhadap stakeholder, (1) Aparat Pemerintah menjadi lebih efektif melalui strategi jemput bola dan sosialisasi pelayanan, menjadi lebih efisien dengan pembentukan unit pelayanan terpadu, dan lebih akuntabel terhadap internal organisasi melalui pelaksanaan tugas berdasarkan aturan dan juklak/juknis secara ketat, (2) Pihak Swasta; belum optimal memberikan iklim investasi yang kondusif, (3) Masyarakat; struktur yang masih vertikal dan prosedur yang masih panjang menyebabkan proses pelayanan membutuhkan waktu lama, prosedural, biaya mahal memberikan rasa kecewa terhadap masyarakat sehingga dari akumulasi kekecewaan menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, pelayanan publik yang kaku berdasarkan juklak/juknis dan berdasarkan perintah atasan sebagai prioritas sehingga dalam memberikan pelayanan tidak responsif terhadap kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Reformasi

Lampiran 24
Contoh ABSTRACT

ABSTRACT

This research is aimed to describe, to analyze and to interpret Public Service Reform in Perspective of Accountability Governance, the research focus on: (1) Illustration of public service reform on IMB at Housing and Development Service, Samarinda Municipal; (2) Accountability Governance of public service reform on IMB; (3) Implication of public service reform for stakeholder.

This research uses qualitative approach. It is intended to get deep description about public service reform on IMB and accountability governance of public service reform with reform implication for stakeholder. The data was obtained by interview, observation, and documentation. Then the data is analyzed by using interactive analysis model by data reduction stage, data display, and data verification. Furthermore, it was conducted examination for validity of data by using credibility, transferability, dependability, and confirmability.

The result research showed that public service reform on IMB at Housing and Development Service of Samarinda Municipal in structure and procedure of bureaucracy, and attitude and behavior of apparatuses have been done by: merger of service and elimination of echelon, forming integrated service unit, changing of authority procedure, ball welcoming strategy, socialization of services, and service attitude. The accountability governance of service reform conducted is including administrative accountability, professional, legal, politic, and moral. The result research showed that Housing and Development Service, Samarinda Municipal has conducted administrative accountability. However, accountability of professional was meant as organization internally, the legal accountability has not implemented yet consistently and it is still rhetorical, the political accountability has been implemented, although still in ceremonial form, with moral accountability has not implemented yet because there is no point if view yet to regulate. The implication of public service reform for stakeholder, (1) Government Apparatus becomes more effective by welcoming ball strategy and socialization of services become more efficient by forming of integrated service unit, and more accountable for internal organization with implementation of duty based on regulation and implementation guide/technical guide tightly, (2) Private side, it is not optimum yet to give conducive investment climate, (3) People, the structure is still vertical and the procedure is still long time causes the process of services need longer time, procedural, costly make disappointed for people, so from accumulation of disappointed caused the people not believe in Local Government. The rigid public service is based on implementation guide/technical guide and based on superior instruction as apriority, so in giving services is not responsive for service quality as demand and expectation of people.

Keywords: Public Service, Accountability, Reform

Lampiran 25
Contoh Halaman Persembahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Kurnain dan Ibunda Nurlaili yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Adik-adikku”

Ucapan terima kasih kepada adik-adikku tersayang Amir, Iman, dan Zainab atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

Lampiran 26
Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Akuntabilitas Governance (Studi tentang Proses Pelayanan IMB pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan dorongan moril untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang telah memberikan motivasi dan dorongan moril untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku Ketua Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Mulawarman yang telah memberikan pengarahan dan masukan-masukan hingga selesainya pendidikan ini.
4. Bapak Dr. Bambang Irawan, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Enos Pabelle, MAP pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan moril untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Bapak Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D yang telah memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Staff Civitas Akademika pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda yang telah menstranformasi ilmu pengetahuan dan dorongan moril untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Bapak Walikota Samarinda yang telah memberikan Bantuan Bea Siswa dan kesempatan serta dorongan moril untuk melanjutkan pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik sebagai informasi bagi mereka yang memerlukan, maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Samarinda, Oktober 2021

Penulis,

Lampiran 27
Contoh penulisan Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Batas Wilayah Kabupaten Pasir	76
2	Distribusi Wilayah Kabupaten Pasir	77
3	Pembagian Wilayah Adminsitratif Kabupaten Pasir	78
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	79

Lampiran 28
Contoh penulisan Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn	27
2	Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	30
3	Variabel Proses Implementasi Kebijakan	33
4	Analisis Data Model Interaktif	66
5	Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	83
6	Komposisi Struktur Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979	119
7	Mekanisme Kerjasama Pemerintah Desa, LMD dan LKMD	191

Lampiran 29

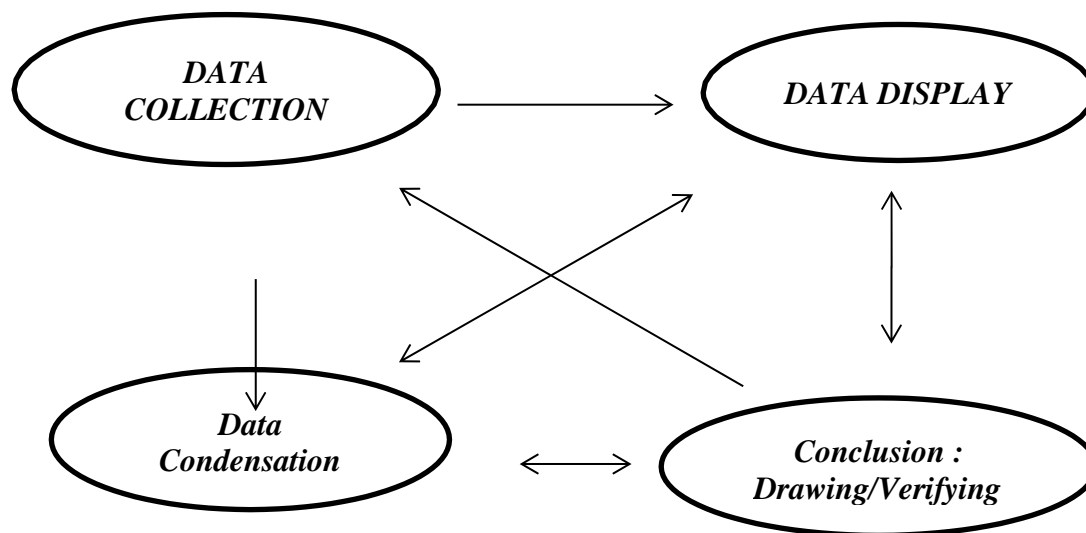
Contoh penulisan Tabel

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Pasir Belengkong

No.	Batas Wilayah	Daerah
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Kuaro
2.	Sebelah Timur	Kecamatan Tanah Grogot
3.	Sebelah Selatan	Kecamatan Tanjung Aru
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Batu Sopang

Sumber : Kecamatan Pasir Belengkong Dalam Angka, 2021

Lampiran 30
Contoh Gambar



Gambar 3.1.
Component Of Data Analysis : Interactive Model
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Lampiran 31

Contoh Penyajian Bab-bab (Model 1 Pendekatan Kualitatif)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	29
1.3. Tujuan Penelitian	29
1.4. Manfaat Penelitian	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	31
2.2. Teori dan Konsep	31
2.2.1. Konsep Good Governance	35
2.2.2. Karakteristik Good Governance	38
2.2.3. Akuntabilitas Governance.....	42
2.3. Pelayanan Publik	45
2.3.1. Memahami Pelayanan Publik	45
2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik	48
2.3.3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Yang Berkualitas	51
2.3.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik	55
2.4. Reformasi Pelayanan Publik	61
2.4.1. Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik Dalam Perspektif OPA, NPM, dan NPS.....	68
2.4.2. Reformasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif Akuntabilitas Governance	72
2.5. Pelayanan IMB Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda .	73
2.6. Kerangka Konseptual	76
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	80
3.2. Lokasi dan Situs Penelitian	81
3.2. Definisi Konseptual	82
3.3. Fokus Penelitian	83
3.4. Sumber Data	83

		50
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	85
3.6.	Teknik Analisis Data	87
3.7.	Keabsahan Data	90
Bab IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Wilayah Pemerintahan	94
4.1.1.	Profil Birokrasi Pemerintahan Kota Samarinda	98
4.1.1.1.	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	98
4.1.1.2.	Dinas/Badan/Kantor Kota Samarinda	99
4.1.1.3.	Kecamatan dan Kelurahan	100
4.1.2.	Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda	109
4.1.2.1.	Latar Belakang	109
4.1.2.2.	Struktur Organisasi	105
4.1.2.3.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	109
4.1.2.4.	Sumber Daya Manusia.....	116
4.1.2.5.	Sarana dan Prasarana	191
4.1.2.6.	Pernyataan Visi dan Misi	193
4.1.3.	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	199
4.1.3.1.	Dasar Pelaksanaan	199
4.1.3.2.	Mekanisme Pelayanan	130
4.1.3.3.	Persyaratan dan Waktu Pelayanan	133
4.2.	Penyajian Data Penelitian	140
4.2.1.	Reformasi Pelayanan Publik Ijin Mendirikan Bangunan	140
4.2.1.1.	Penggabungan dan Penghapusan Eselon	140
4.2.1.2.	Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu	144
4.2.1.3.	Pelimpahan Kewenangan	146
4.2.1.4.	Strategi Jemput Bola	148
4.2.1.5.	Sosialisasi Pelayanan	150
4.2.1.6.	Sikap Pelayanan	151
4.2.2.	Akuntabilitas Governance	154
4.2.2.1.	Akuntabilitas Administratif	154
4.2.2.2.	Akuntabilitas Profesional	156
4.2.2.3.	Akuntabilitas Legal	159
4.2.2.4.	Akuntabilitas Politik	160
4.2.2.5.	Akuntabilitas Moral	162
4.2.3.	Implikasi Reformasi Pelayanan Publik Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Stakeholder	164
4.2.3.1.	Aparat Pemerintah	164
4.2.3.1.	Swasta	166
4.2.3.3.	Masyarakat	167
4.3.	Pembahasan	177
4.3.1.	Reformasi Pelayanan Publik Ijin Mendirikan Bangunan	177
4.3.2.	Akuntabilitas Governance	193
4.3.3.	Implikasi Reformasi Pelayanan Publik IjinMendirikan Bangunan Terhadap Stakeholder	200
4.3.4.	Matriks Temuan Penelitian	208

		51
BAB V.	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	211
	5.2. Saran	217
	5.2.1. Saran Akademis	217
	5.2.2. Saran Praktis	220
DAFTAR PUSTAKA		224

Lampiran 32

Contoh Penyajian Bab-bab (Model 2 Pendekatan Kuantitatif)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2. Teori dan Konsep	
2.3. Hipotesis	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Jenis Penelitian Penelitian	60
3.2. Lokasi Penelitian	61
3.3. Definisi Konsep	62
3.4. Definisi Operasional	62
3.5. Sumber Data	62
3.6. Teknik Pengumpulan Data	63
3.7. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1. Hasil Penelitian	76
4.2. Temuan Penelitian: Sebuah Pembahasan	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	192
5.1. Kesimpulan	192
5.2. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	



ARTICLE

Policy Response and Collaboration in Handling Covid-19 in East Kutai Regency With An Adaptive Governance Approach in Disasters

Aji Ratna Kusuma^{1*} and Paisal Akbar²

¹Master of Public Administration, Universitas Mulawarman, Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua 75411, Samarinda, Indonesia

²Doctoral Program in Political Islam-Political Science, Jusuf Kalla School of Government, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, 55183, Yogyakarta, Indonesia

How to cite: Kusuma, Aji Ratna & Akbar, Paisal. (2021). Policy Response And Collaboration In Handling Covid-19 In East Kutai Regency With An Adaptive Governance Approach In Disaster. *Jurnal Borneo Administrator*, 17 (2), 223-240. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i2.866>

Article History

Received: 15 March 2021

Accepted: 14 July 2021

Keywords:

Collaboration

Policy response

COVID-19

Adaptive Governance

ABSTRACT

The current COVID-19 pandemic condition requires the Indonesian government to act quickly and effectively in dealing with the threat of a crisis; for this reason, the concept of adaptive governance promises a more innovative approach in an effective way to deal with a complex environment. Adaptation in governance is carried out by producing policy products that are swift, efficient, and effective in handling the COVID-19 pandemic. This research aims to find out how the local government of East Kutai Regency applies the concept of adaptive governance with the scope of policies and collaboration between parties in handling the COVID-19 Pandemic. The benefits of research will fill the space for scientific studies related to adaptive governance approaches in handling pandemics through policy products and collaboration between parties within the most basic scope, namely the East Kutai Regency level. This research is qualitative research with the descriptive method; the approach used in this research is a case study approach. For research data analysis, this study used Qualitative Data Software Analysis (QDSA) NVivo 12 Plus. The study results show that the five agencies have carried out their roles to provide adaptive governance. Of the six indicators, each agency has a different percentage level. There are tons of steps that have been taken to prevent the spread and handling of COVID-19 by the government and agencies, as well as layers of society. The involvement of Task Force Teams at all levels, the Police, Military District Commands, Community Organizations, NGOs, and Companies in assisting the prevention and handling of the COVID-19 pandemic running the East Kutai District Health Office shows a form of participation and collaboration in handling the COVID-19 pandemic health disaster. Which is an essential value in realizing adaptive governance.

A. INTRODUCTION

The year 2020 is a historic year for human life, not because of the pen of a happy history but the irony of a pen of history full of fear, sorrow, and death. Occurring evenly throughout

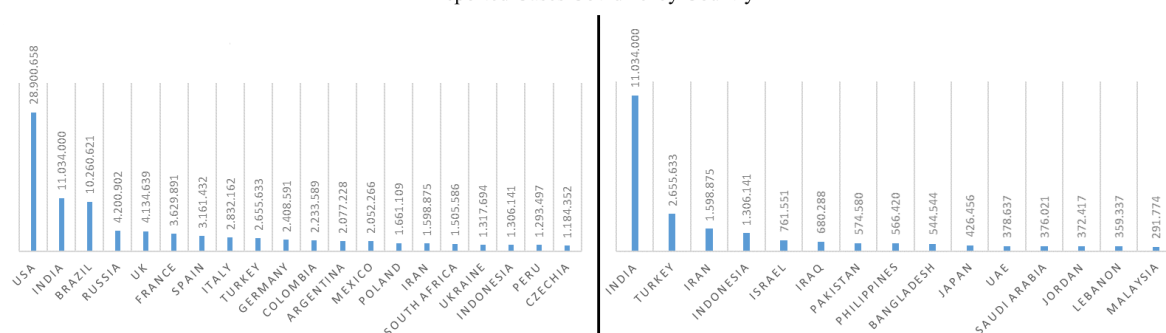
* Corresponding Author

Email : ajiratnakusuma@fisip.unmul.ac.id

the world (Chen et al., 2020), Coronavirus Disease (COVID-19) is present and becomes a deadly outbreak. Recorded, the entire country's total cases on February 24, 2021, COVID-19 has infected 112,774,854 people on earth and resulted in 2,499,111 deaths of the exposed victim (Worldmeter, 2021). COVID-19 is the first pandemic in the modern era that impacts many human life sectors ranging from social, economic, political, educational, and other activities that require social interaction must be stopped and limited (Hadiwardoyo, 2020; Junaedi et al., 2020; Khan et al., 2021; Nasruddin & Haq, 2020; Syah, 2020).

Referring Graph 1 shows that Indonesia's position is ranked 18th in the world as a country with the total number of COVID-19 cases reaching 1,306,141 cases. Meanwhile, when viewed more regionally in Asia, Indonesia ranks 4th as the country with the highest cases. It is the country in the Southeast Asia region with the highest cases of COVID-19.

Graph 1. The Total Number of COVID-19 Cases in the World and Asia by Country
Reported Cases Covid-19 by Country



Source: Worldmeter (2021)

With a total area of 7.81 million km² and 17,499 islands (Pratama, 2020), the picture of the complexity of mitigating the COVID-19 pandemic in such a large area is easily illustrated and is a real challenge and must be faced by all government stakeholders in Indonesia (Olivia et al., 2020; Samudro & Madjid, 2020). There is an unfair side if we compare the successful handling of the COVID-19 in Singapore with the span of a total area of only 722.5 km² by comparing COVID-19 in Indonesia, which has a large area and a much larger population than Singapore, Malaysia, and Vietnam.

Therefore, the Indonesian government, in handling the COVID-19 pandemic, must formulate the appropriate policy products to handle the spread of COVID-19 and maintain the health, social, and economic stability of the people in Indonesia at the same time (Junaedi et al., 2020; Shahbudin, 2020; Tuwu, 2020). Adaptation in governance is an important thing that must carry out by producing swift, efficient, and practical policy products in handling the COVID-19 pandemic (Janssen & van der Voort, 2020; Telaumbanua, 2020).

Adaptive governance was proposed as an alternative method in managing complex social-environmental problems, including, in this case, related to disaster situations (Brunner, 2010; Djalante, 2012). The current pandemic situation requires the Indonesian government to act quickly and effectively in dealing with the threat of a crisis, which is why the concept of adaptive governance promises a more innovative approach in an effective way to deal with a complex environment (Holley, 2010).

In addition to the central government's role, the handling of the COVID-19 pandemic is also the jurisdiction of the local government (Syafri, 2020). The involvement of local governments in mitigating the handling of COVID-19 is inextricable. With Indonesia's vast area so large, the handling of zoning per region becomes a decent thing to run. The implementation of Large-Scale Social Restrictions (called PSBB) is one of the policy products that the Government of Indonesia has implemented in many regions to handle the

spread of COVID-19 in the area (Handayanto & Herlawati, 2020; Putsanra, 2020; Saputra & Salma, 2020).

The importance of local governments' role in handling the COVID-19 pandemic is inseparable; a collaboration of all relevant parties in handling is one of the keys to success to reduce the spread of the COVID-19 virus (Syafri, 2020). For this reason, this research will look at how to mitigate the handling of the COVID-19 virus at the lowest level in one of the regencies in East Kalimantan Province, namely the East Kutai Regency. This research aims to find out how the local government of East Kutai Regency applies the concept of adaptive governance with the scope of policies and collaboration between parties in handling the COVID-19 Pandemic.

B. LITERATURE REVIEW

Adaptive governance is an approach used to address complex obstacle situations that occur in the field involving many stakeholders with different interests resulting in inaccuracies in determining the actions to be taken (Janssen & van der Voort, 2016). Furthermore, according to Huiteima et al. (2009), adaptive governance is a step to overcome uncertainties caused by complexity, spontaneity, non-reduction, variability, and the quality of collaborative ecosystems.

To lead to the concept of adaptive, effective governance, it can realize if there is a robust interrelated relationship between science, governance, and practice (Wyborn, 2015). The previous researchers have widely done the literature on disaster mitigation with the application of adaptive governance as a solution in disaster management; these studies have currently provided a basis for researchers to describe and classify the concept of adaptive governance in the face of a series of interactions between actors, networks, organizations, and institutions that arise in pursuit of the desired circumstances in a condition (Chaffin et al., 2014).

The following is some literature of previous studies that discuss related disaster mitigation with an adaptive governance approach.

Table 1. Literature Review Related to Adaptive Governance in Disaster Mitigation

No	Authors & Titles	Focus	Findings
1	Lei et al., (2015), Adaptive governance to typhoon disasters for coastal sustainability: A case study in Guangdong, China	Adaptive typhoon disaster management in Guangdong, China	Structural action in disaster management is not enough; in disaster mitigation, typhoons require non-structural actions and resilience development by putting forward the concept of adaptive governance; adaptive governance is carried out through multi-stakeholder participation and vertical-horizontal coordination.
2	Aoki (2016), Adaptive governance for resilience in the wake of the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami	It was investigating the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami that impacted governance.	Through a polycentric government, the Japanese system created various institutional governance arrangements created to respond to labor shortages in municipal government offices and organizations/institutions. This experience shows that decentralized disaster governance and ready to mobilize a polycentric governance system will manage disasters well.
3	Hurlbert & Gupta (2016),	To answer what governance structures can facilitate	Catastrophic climate change conditions, drought, and flooding can be better

<p>Adaptive Governance, Uncertainty, and Risk: Policy Framing and Responses to Climate Change, Drought, and Flood</p>	<p>adaptation to develop policies for disaster management of climate change, drought, and floods.</p>	<p>responded to when the resulting policy relationships are interconnected. The problems found can be framed through policies that result in a better understanding of adaptive governance.</p>
<p>4. From disaster management to adaptive governance, Governance challenges to achieving resilient food systems in Australia</p>	<p>How governance arrangements and processes affect the involvement of food system actors.</p>	<p>Although there have been standard rules through formal governance instruments that upheld in the implementation of governance in disaster management. However, still, the use of roles is not well understood. Food availability responsibilities are still borne by supermarkets, which do not make room for a non-supermarket food system. The policy challenge is to ensure that responsibility, participation, and collaboration become a stronger focus for adaptive governance during and after disasters.</p>
<p>5. Flood Risk and Resilience in the Netherlands: In Search of an Adaptive Governance Approach</p>	<p>The Dutch introduced more polycentric and adaptive governance in flood management, which they term multilayered safety (MLS).</p>	<p>Flood management with an adaptive and polycentric governance approach is considered capable of presenting good flood disaster management. Although many governments face rejection by a small network of water experts and permanent institutionalists, adaptive and polycentric new policies deliver the desired results.</p>
<p>6. Adaptive governance in the developing world: disaster risk reduction in the State of Odisha, India</p>	<p>Discussing the case of adaptive governance success in non-western developing countries, namely India, focusing on Odisha State.</p>	<p>The implementation of adaptive governance is based on two main factors. First, traumatic shock factors in the form of shocks that occur at society's economic and social levels. Second, the shock factor of political leadership committed to reforming existing governance and creating a more resilient system.</p>
<p>7. Applying the principles of adaptive governance to bushfire management: a case study from the South West of Australia</p>	<p>Adaptive governance in tackling the socio-ecological problems of bushfires in south-west Australia</p>	<p>The findings suggest that the current disaster policy discourse in Australia has supported the principle of adaptive governance. However, its implementation in some regions depends on the definition of the policy framework implemented in the region.</p>
<p>8. Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic</p>	<p>Disaster management of the COVID-19 pandemic in the Netherlands by analyzing agility and adaptive governance approaches.</p>	<p>Existing structures and devices can contribute to implementation that enables adaptation and agility. However, on the other hand, there is a conflict between adaptability and agility. Institutional efforts are needed to facilitate adaptive governance in the long term.</p>
<p>9. An adaptive governance and health system responsible for the COVID-19 emergency</p>	<p>Disaster management of the COVID-19 pandemic in Bangladesh through adaptive governance</p>	<p>In handling the COVID-19 pandemic disaster in Bangladesh, appropriate response strategies are needed. The optimal strategy is to filter the most viable range of health response networks as well as organization networks that can provide the most effective results on a massif scale, which is why adaptive response strategies are needed to align the network of old</p>

organizations and new organizational networks in the handling of the COVID-19 pandemic.

Source: Processed By The Author

Based on the literature review above, adaptive governance is critical in implementing effective and efficient disaster management. [Rijke et al. \(2012\)](#) are of the view that to realize adaptive governance, and a basic assessment is needed that pays more attention to “good enough governance” rather than towards “optimal governance”, is because, in its implementation, the concept of adaptive governance will be found the uncertainty requires action that focuses on important things by making adjustments to share priorities in the short and long term, feasibility, and whether or not a goal is realistic to be achieved through the resulting policies ([Grindle, 2004](#); [Rijke et al., 2012](#)).

Various approaches are needed to measure adaptive governance achievement that becomes the initial benchmark for the final value of adaptive governance performance. [Rijke et al. \(2012\)](#) introduced a “fit-for-purpose” framework consisting of three main parts: developing a diagnostic approach to describe an adaptive governance operation. There are three essential steps in diagnosing fit-for-purpose governance mechanisms: (1) identifying the governance objectives, (2) mapping the context, and (3) evaluating the outcomes of the governance mechanisms ([Rijke et al., 2012](#)).

The involvement of various elements in handling is necessary, meaning that not only formal regulations governing disaster management are needed but also high agility and adaptability to all relevant stakeholders for post-disaster recovery to be more optimal ([Khan et al., 2021](#); [Lei et al., 2015](#); [Ruane, 2020](#); [Smith & Lawrence, 2018](#)). [Hasselman \(2017\)](#), adaptive governance combines adaptive management through democratic institutions, polity, and policy facets of governance, with the consequences for credibility and transparency discussed by the systems and agents in place.

C. METHOD

This research is qualitative research with the descriptive method; the approach used in this study is the case study approach. According to [Creswell & Poth \(2016\)](#) and [Al-Hamdi et al. \(2020\)](#), the case study approach's feature is that the case studied must have specific parameters such as place or time and provide a deep understanding of the case study. The location of the research was conducted in East Kutai Regency, East Kalimantan Province. Data collection in this study using two data sources, namely primary and secondary data; primary data is data obtained by researchers in interviews with related parties in handling the COVID-19 pandemic in East Kutai Regency. Some of the parties interviewed in this study can be seen in the following table.

Table 2. Key Informant

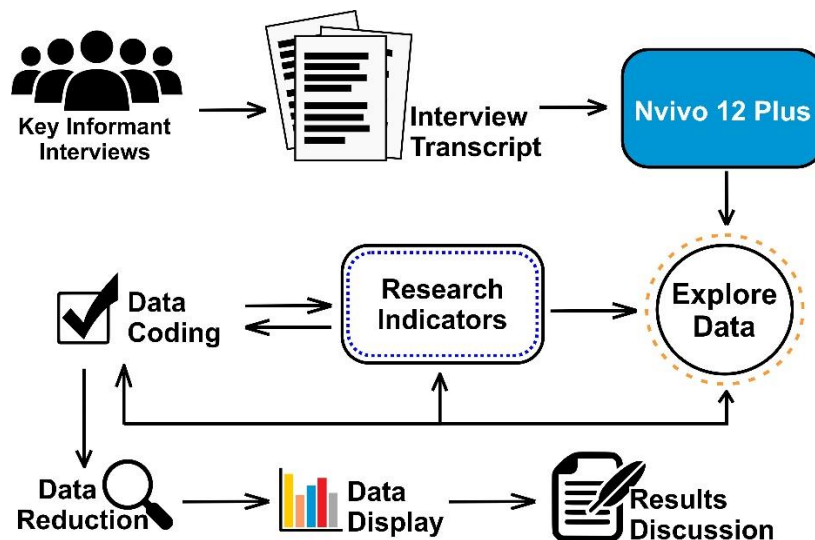
No	Sources
1	Regional Disaster Management Agency (called BPBD) East Kutai Regency
2	East Kutai District Health Office
3	East Kutai District Transportation Office
4	Social Service of East Kutai Regency
5	Community & Village Empowerment Office

Source: Processed by Author

Meanwhile, the researchers from available literature obtained secondary data such as government websites, online news media, government reports, and publications of previous

scientific articles. This study used Qualitative Data Software Analysis (QDSA) NVivo 12 Plus to analyze research data. NVivo 12 Plus is a software that can help researchers provide greater understanding through a more in-depth analysis of the study findings (Andrew et al., 2008; Edwards-Jones, 2014; Muhtarom et al., 2017), this is the function of this software. Nvivo 12 plus software allows the researchers to code interview transcripts based on the research indicators (Ruane, 2020). The use of NVivo as an analysis tool has stages that begin with; (1) data capture, (2) data import, (3) data coding, (4) data classification, and (5) data presentation (Brandão, 2015; Loilatu et al., 2021).

By presenting the resulting data in the form of word cloud analysis and connectivity between stakeholders responsible for handling the COVID-19 pandemic, it will provide a good understanding of the extent of policy response and collaboration in handling COVID-19 in District East Kutai. The used coding of data in this study utilized open coding by identifying the keywords, phrases, or sentences contained in the interview transcript. According to the indicators used, data coding was determined: Prevention, Handling, Adaptation, Agility, Organizational Networks, and Supportive Relationships. The stages of data analysis in this study can be seen in the following figure:



Source: Processed by Author
Picture 1. Data Analysis Stages

D. RESULTS AND DISCUSSIONS

Regional Profile and Distribution of Health Facilities in East Kutai Regency

East Kutai Regency is an expansion district of Kutai Regency, which is determined based on Law No. 47 of 1999 concerning the expansion of provincial and district areas as well as the decision of the Minister of Home Affairs dated October 28, 1999 (Pemkab. Kutai Timur, 2021). The area of East Kutai Regency covers 35,747.50 km² or 17% of the total area of East Kalimantan Province today; the geographical condition of East Kutai Regency consists of a land area of 536,200 ha, mountains of 1.42 million ha, sea/coastal waters, and rivers and lakes (Pemkab. Kutai Timur, 2021). Administratively, East Kutai Regency is divided into 18 sub-districts (see Picture 2) with 141 villages and has about 434,459 people (BPS Kutai Timur, 2021; DPMPSTSP Kabupaten Kutai Timur, 2021).

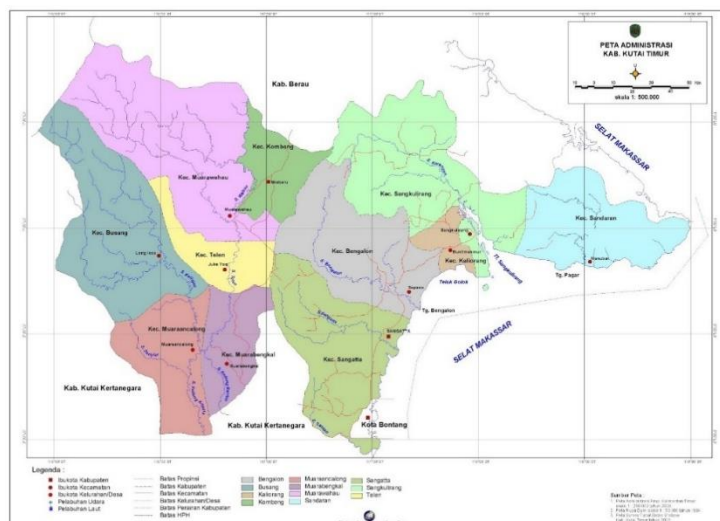


Photo: [DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur \(2021\)](#)
 Picture 2. Map of East Kutai Regency

East Kutai Regency's health condition is an inseparable part of population welfare indicators (BPS Kutai Timur, 2019). The percentage development of people who have health complaints in the East Kutai Regency has increased in 2019/2020 (BPS Kutai Timur, 2019). This increasing percentage is inseparable from the health crisis that occurred in the early 2020 pandemic COVID-19. Health facilities and infrastructure are essential in providing inclusive health services to all communities in East Kutai Regency. An overview of the distribution of health infrastructure facilities owned by East Kutai Regency's government can be seen in table 3.

Table 3. Health Facilities in East Kutai Regency

No	District	Hospital	Public Health Center	Maid Public Health Center	Clinic	Maternity Hospital
1	Muara Ancalong	-	1	6	1	-
2	Busang	-	1	4	2	-
3	Long Mesangat	-	1	7	-	-
4	Muara Wahau	-	2	6	4	-
5	Telen	-	1	6	-	-
6	Kongbeng	-	1	7	2	-
7	Muara Bengkal	-	1	5	1	2
8	Batu Ampar	-	1	6	-	-
9	Sangatta Utara	2	2	1	4	2
10	Bengalon	1	2	6	1	-
11	Teluk Pandan	1	1	5	2	-
12	Sangatta Selatan	-	1	4	2	-
13	Rantau Pulung	-	1	7	-	-
14	Sangkulirang	-	1	15	3	-
15	Kaliorang	-	1	4	-	-
16	Sandaran	-	1	8	2	-
17	Kaubun	-	1	7	1	-
18	Karangan	-	1	6	1	-
Total		4	21	110	26	4

Source: [BPS Kutai Timur \(2021\)](#)

From the table, it can be seen that the distribution of health facilities and infrastructure in East Kutai Regency is evenly distributed with the availability of primary health facilities,

namely Public Health Center (called Puskesmas) in all sub-districts in East Kutai Regency. Puskesmas is one of the agencies engaged in public health services; Puskesmas has a responsibility to realize the quality of health in the region, which includes four leading indicators, namely healthy relationships, healthy behaviors, quality health services, and improving the quality of health of the population (Cahyanti & Purnama, 2017; Handayani, 2016). In addition to the spread of Puskesmas evenly, East Kutai Regency has also had four hospital health facilities distributed in three sub-districts, four of which later became COVID-19 patient referral hospitals in East Kutai Regency.

COVID-19 in East Kutai Regency

The spread of COVID-19 in East Kalimantan Province is still occurring, recorded on March 1, 2021 update infographic COVID-19 in East Kalimantan Province showed positive case confirmation as many as 55,828 details of patients treated as many as 6,855, patients recovered 47,654 cases. Patients died 1,319 cases (covid19.kaltimprov.go.id, 2021). The high number of cases in East Kalimantan province shows an increasing movement. East Kutai Regency, as one of the regions in East Kalimantan Province, also has a positive confirmation case rate that occupies the 4th position as the Regency/City with the most positive confirmation cases in East Kalimantan Province of nine districts/cities (covid19.kaltimprov.go.id, 2021). Picture 3 shows the total positive cases of COVID-19 in East Kutai Regency, as many as 7,309 cases.

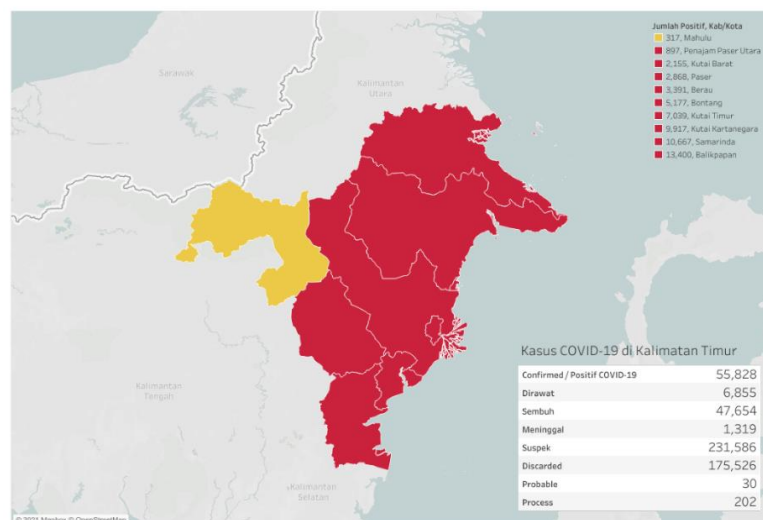


Photo: covid19.kaltimprov.go.id (2021)

Picture 3. COVID-19 Monitoring Map in East Kalimantan Province

In many cases, almost all regions in East Kalimantan Province occupy the position as a red zone for the spread of COVID-19. According to Doni Monardo, head of the Task Force on The Acceleration of COVID-19 Handling, the Red Zone category of COVID-19 spread is the category of areas with a high-risk COVID-19 transmission. In contrast, the Yellow Zone category is an area with a low risk of COVID-19 transmission (Kementerian Kesehatan RI, 2020a, 2020b). Based on Picture 3, in addition to showing the number of COVID-19 spread in East Kalimantan Province, it also shows the category of zones owned by each District/City. Nine of the ten regencies/cities in East Kalimantan are listed as areas classified as Red Zones, including East Kutai Regency. There is only one area that is still classified as a Yellow Zone, namely Mahakam Ulu Regency.

In contrast to the COVID-19 Monitoring Map of East Kalimantan Province, which depicts most of the region is within the Red Zone. At the national level, through the update of the COVID-19 Risk Map from the web portal: [Covid19.go.id \(2021\)](https://Covid19.go.id) of the Task Force on Handling COVID-19 as well as the Committee for Handling COVID-19 and National Economic Recovery shows the position of the risk of the spread of COVID-19 in the province of East Kalimantan categorize Medium Risk, indicated by the identification of the color "orange" in picture 4. All regencies/cities in East Kalimantan province are categorized as areas at moderate risk in the spread of COVID-19. The regional Risk Zoning Map has been released from the Task Force's calculation on Handling COVID-19 based on public health indicators shown in table 4.

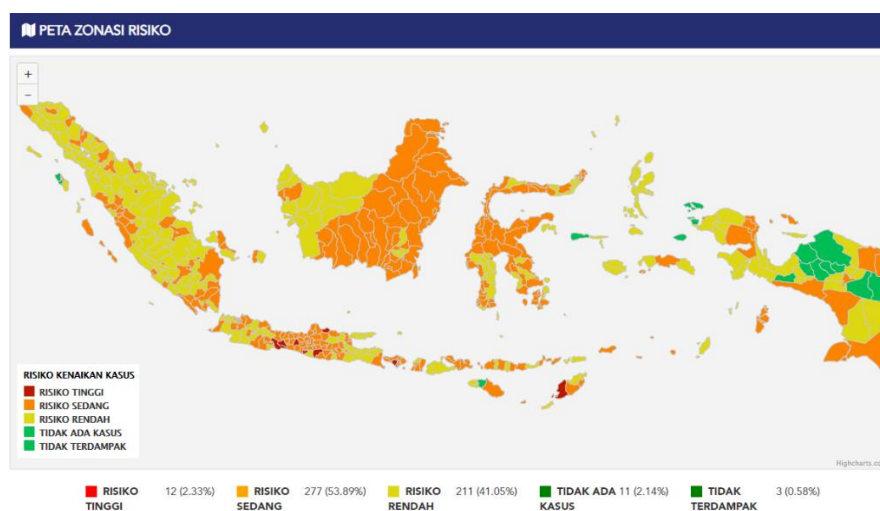


Photo: [Covid19.go.id \(2021\)](https://Covid19.go.id)

Picture 4. COVID-19 Risk Zoning Map

Table 4. Public Health Indicators for COVID-19 Risk Zoning

No	Indicators	Variable
1	Epidemiological Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease in the number of positive & probable cases in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • Decrease in the number of suspect cases in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • Decrease in the number of positive & probable cases died in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • The decrease in the number of deaths in suspect cases in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • Decrease in the number of positive & probable cases hospitalized in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • The decrease in the number of hospitalized suspect cases in the last week by $\geq 50\%$ from the peak • Cumulative percentage of cases recovered from all positive & probable cases • Positive case incidence rate per 100,000 inhabitants • The mortality rate of positive cases per 100,000 inhabitants • Incidence Rate Speed per 100,000 inhabitants
2	Public Health Surveillance Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • The number of diagnosis sample examinations has increased over the past two weeks • Low positivity rate (target $\leq 5\%$ positive sample of all people examined)
3	Health Care Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • The number of beds in the isolation room of the Referral Hospital can accommodate up to 20% of the number of

COVID-19 positive patients treated in the hospital

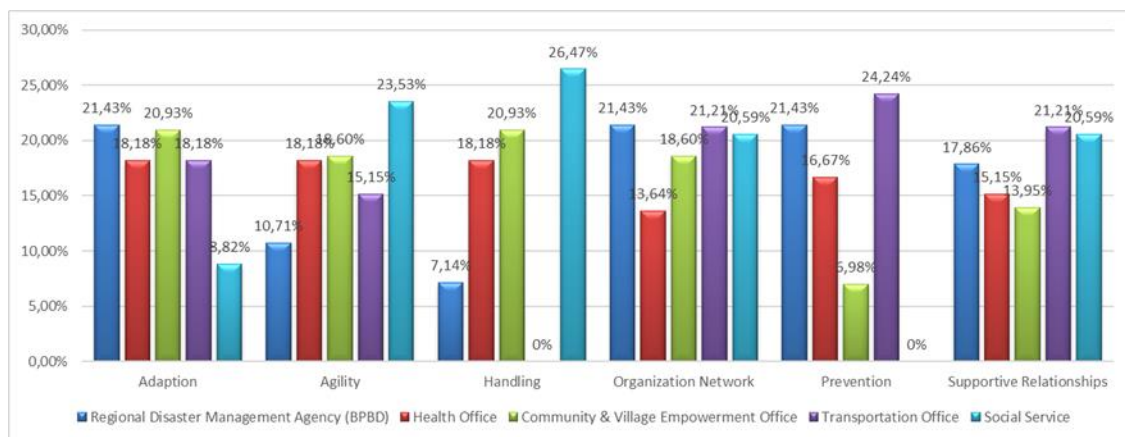
- The number of beds in the Referral Hospital can accommodate up to 20% of the number of ODP, PDP, and COVID-19 positive patients treated in the hospital

Source: Covid19.go.id (2021)

Adaptive Governance in Responding to COVID-19

We have seen the condition of COVID-19 in the East Kutai Regency in the previous section. This section will explain the extent to which the handling of the COVID-19 Pandemic has been carried out by the parties responsible for handling it through adaptive governance. Several adaptive governance elements that became indicators in this study were then searched for their relationship with information from key informants through interviews. After they were found in the process carefully, the researchers in the Nvivo 12 Plus application explored using the Explore Crosstab Query feature. The results of data visualization can be seen in Graph 1.

Graph 1. The Intensity of Elements of Adaptive Governance in Responding to COVID-19

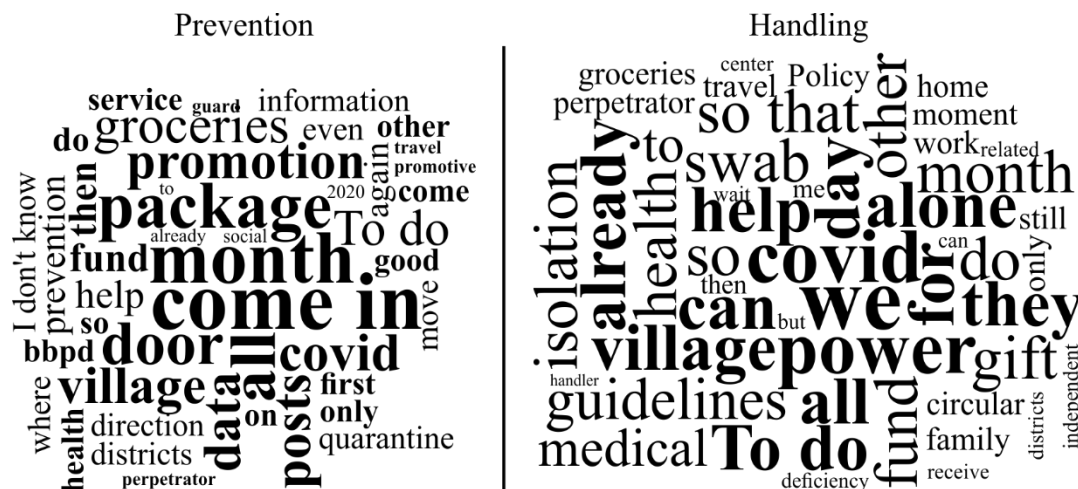


Graph 1 shows the activity of each agency in carrying out its role to provide adaptive governance. Of the six indicators, each agency has a different percentage level. Referring to these data, it can be seen carefully, the Transportation Office agency in the handling of the COVID-19 virus does not show any activities carried out because indeed, the tasks and functions that are carried out tend to be more inclined towards Prevention activities, which shows the highest percentage in the Prevention indicator, namely 24.24%. Meanwhile, Social Service agencies have a level of activity in the Prevention indicator area, but Social Service agencies have the highest level with 26.47% in the Handling indicator.

The responsible five agencies for handling COVID-19 must carry out their duties and functions well; each agency has carried out the ability to respond to disaster situations quickly through agility. Agility indicators are essential indicators that must be presented in disaster management that require a quick response from stakeholders to save the community. [Huitema et al. \(2009\)](#) dan [Janssen & van der Voort \(2020\)](#) assess the dexterity of various parties in responding to critical times as crucial. The percentage of agility shown in picture 3 shows that all agencies have a level of agility percentage even though the percentage level is different. Likewise, in the other three indicators: adaptation, organization network, and supportive relationships, overall, the five agencies have them with different percentage levels.

Furthermore, interviews were conducted with research resource persons who were then coded with NVivo 12 plus software and processed in the feature to explore the word cloud results from coding data related to indicators of prevention and handling of COVID-19 in

East Kutai Regency, the world cloud provided a visual reference. Of complex information is conveyed quickly and clearly (DePaolo & Wilkinson, 2014). The word cloud image results show several keywords present in the steps to prevent the spread and handling of COVID-19, which have been implemented in the East Kutai Regency; this can be seen in picture 5.



Picture 5. Word Frequency Query in Prevention and Handling in Node Interview

The high intensity of the words “enter,” “door,” “post,” “promotion,” and “package” in the world cloud Prevention shows the focus of stakeholders in preventing COVID-19 in East Kutai Regency through restrictions and monitoring of access to activities in and out of the area. The restrictions and supervision that are carried out aim to prevent the increasingly high spread of COVID-19, especially for people who come from the COVID-19 Red Zone area. Posko has been established at several points to control the mobility of the population in East Kutai District, while several posts have been established; namely, 1) Patung Burung Monitor Post; 2) Muara Bengkal Monitoring Post; and 3) Kongbeng Monitoring Post. Furthermore, the said package shows preventive stakeholders' efforts in providing socio-economic assistance to communities affected by the COVID-19 Pandemic in East Kutai Regency.

Meanwhile, the world cloud section of handling shows the intensity of the words "us," "energy," "assistance," "isolation," and "swab" being the words that most often appeared from research sources. It shows that the process of handling COVID-19 carried out by stakeholders is carried out by prioritizing joint handling steps at all levels. Besides, the prevention of spread is also carried out by requiring 14 days of isolation for all people outside the East Kutai Regency area (Arumanto, 2020). For people who have symptoms of COVID-19, a Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab examination is carried out at the COVID-19 referral hospital in East Kutai Regency; if the test results are positive, intensive care will be carried out in the quarantine room (Sarita, 2020).

Adaptive governance in the face of disasters is one of the keys to successful disaster management (Molenveld & van Buuren, 2019). The East Kutai Regency Government has taken various adaptation steps to the pandemic situation in its area by giving birth to various policies to deal with the increase in COVID-19 cases in East Kutai Regency. Agility in producing policy regulations that can answer problems in the field requires its presence in responding to crises (Janssen & van der Voort, 2020). All policies made by the East Kutai Regency Government cannot be separated from the policy references that have been issued by the Central Government and the Provincial Government of East Kalimantan. Some of the policy regulations that have been made can be seen in the following table 5:

Table 5. East Kutai Regency Policy in Dealing with the COVID-19 Pandemic

No	Policy
1	Circular of the Governor of East Kalimantan Province Number 188.32/2059/DPMD concerning COVID-19 Response Village and Solid Affirmation of Village Cash Works.
2	Decree of the Regent of East Kutai Number 443.2/K.188/2020 concerning the Determination of The Status of Extraordinary Events With Certain Emergencies, Emergency Of Corona Disease Outbreak 2019 (COVID-19) in East Kutai Regency.
3	Decree of the Regent of East Kutai Number 443.2/K.228/2020 concerning the Determination of Emergency Response Status for Non-Natural Disasters Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in East Kutai Regency.
4	Decree of the Regent No. 443.2/K.214/2020 concerning the Establishment of a Task Force to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in East Kutai Regency.
5	Circular of the Regent of East Kutai Regency Number 140/187/PEMDES. DPMD on Accelerating COVID-19 Response Village Fund Response and Village Fund BLT Distribution.
6	East Kutai Regent Circular Number 188.32/130/DPMDes concerning COVID-19 Response Village and Solid Affirmation of Village Cash Works.
7	East Kutai Regent Regulation Number 32 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019.
8	East Kutai Regent Circular Number: 366/668/PB. COVID-19/CI/2020 on Curfew and Centralized Quarantine.

Source: Processed by Author

The policies that have been implemented above illustrate the adaptive management activities carried out by the East Kutai Regency Government in responding to the handling of the COVID-19 Pandemic. This is shown by the agility of the East Kutai Regency government in producing regional regulations that make it easy for related parties to mitigate the COVID-19 health disaster in 2020. In addition, it is also known that in establishing these regional regulations, the East Kutai Regency Government carries out participatory decision-making, involving various parties to formulate regulations that are born in a health emergency. The participatory involvement of various parties in formulating policy regulations in the East Kutai Regency during the disaster period provides an excellent opportunity in presenting solutions for all sectors affected by the problems being faced (Hurlbert & Gupta, 2016; Lei et al., 2015). The regional regulations produced above include increasing the health emergency status in East Kutai Regency, forming a task force for handling COVID-19, and village budget management policies for social assistance for affected village communities.

Furthermore, imposing discipline and law enforcement are also efforts of the local government East Kutai Regency to implement health protocols in daily activities. Activity restrictions during the curfew and centralized quarantine in several regions or regions will also be enforced if COVID-19 transmission is found in the area. Local governments in implementing adaptive governance are considered more sensitive (Hong & Lee, 2018), so they can react more agile in responding to disasters that occur through the resulting policies. Each region has a defined policy framework for the situation at hand to respond to adaptive governance in a disaster (Ruane, 2020). For that reason, East Kutai Regency has made a derivative policy from the policies for handling COVID-19 in the Central Government, which have been adjusted to the pandemic situation in a certain region.

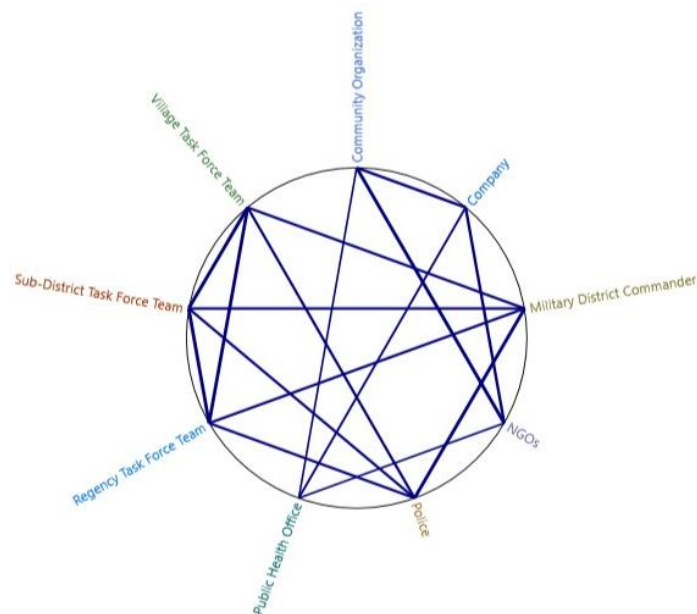


Photo: Nvivo 12 Plus

Picture 6. Related parties in the prevention and handling of the COVID-19

Picture 6 shows the network of agencies involved in handling the COVID-19 pandemic in the East Kutai Regency. These agencies' presence emerged from the processing of the interview manuscripts for the five research sources that the researcher had conducted. The nine agencies play an active role in the mitigation process of the COVID-19 pandemic disaster in East Kutai Regency, namely the 1) Health Service; 2) Police, 3) Military District Command; 4) District Task Force Team; 5) Sub-District Task Force Team; 6) Village Task Force Team; 7) Community Organizations; 8) Community Social Institutions (NGOs); 9) as well as companies in East Kutai District. The active involvement of the nine agencies was shown from the steps to prevent the spread of COVID-19 to the process of handling people affected by the pandemic both healthily, economically, and socially.

The mutually supportive relationship between the above agencies is indicated by a line connected between agencies; the thicker the line created shows, the higher level of interaction between agencies during the COVID-19 disaster management period in East Kutai Regency. If we look carefully at the thick line that appears, there are between the District Task Force Team, the Sub-District Task Force Team, and the Village Task Force Team, connected by a massive thick line. This shows that between the Task Force Teams there are handling activities that are related, this is, of course, the case because the Task Force Team is formed with a tiered vertical structure so that what is the decision on the handling policy that the District Task Force Team has decided will be carried out by the existing levels. Under him, namely the Sub-District Task Force Team and the Village Task Force Team.

Apart from the Task Force Team, there is also a strong relationship between the Police and the Military District Command. Based on the interview results, this strong relationship occurred because the Police and the Military District Command had interrelated roles in securing and appealing disciplinary health protocols to the people in East Kutai District or people who wanted to enter the East Kutai area guarding the post. Available monitoring post. Furthermore, the task force's composition also consists of the Police and District Military Command. The interrelated relationship with the Task Force Teams at all levels appears in picture 7.

The participation of community organizations, NGOs, and companies in the East Kutai District is also enjoyable to explore. The participation of parties outside government stakeholders indicates that collaborative adaptive governance occurs at the government and community levels. Based on the interview results, the community organizations that handled the pandemic in East Kutai Regency were Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU) and other community organizations.

Adaptive governance provides convenience and agility in disaster management (Huitema et al., 2009). Its presence then played an essential role in responding to the COVID-19 pandemic situation the East Kutai Regency faced. The active involvement of five agencies in the organizational network, then creating mutually supportive relationships in preventing and handling COVID-19, shows the importance of effective government in dealing with crises. Chaffin et al. (2014) revealed that the involvement of organizational networks through actors who play a role in pursuing certain situations is a prerequisite for adaptive governance in creating the desired condition. This can be seen from the involvement of each of those agencies in handling the COVID-19 pandemic in the East Kutai Regency. Besides, Smith & Lawrence (2018) also explain all parties' participation in disaster management through good collaboration in making the disaster management process during a disaster and after a disaster occurs.

Regarding the policies produced in handling the COVID-19 pandemic have also become the East Kutai Regency government's primary concern. By presenting responsive and massive policies, massive in this case is intended for policy products produced by all areas affected by disasters through various institutions involved in the disaster mitigation process. Hurlbert & Gupta (2016) stated that disaster management requires related policies to resolve problems that can be resolved with various policies made. Furthermore, Naomi Aoki (2016) said the central government's role in disaster management focuses on crucial roles as financiers while other parties at all levels, both central and regional, from profit-oriented to non-profit, consciously and organically work together to form semi-autonomous governance arrangements of different scales, so that they complement each other in mitigating disasters. This is also shown in the picture above, where various parties' involvement in responding to pandemic disasters is present in East Kutai Regency.

As Khan et al. (2021) have said that the optimal pandemic management strategy is to filter the set of organized networks that can provide the most effective results on a massif scale, which is why adaptive response strategies are needed to align the network of old organizations and new organizational networks in the handling of the COVID-19 pandemic. This issue also needs to be optimized again in East Kutai Regency to handle the COVID-19 Pandemic among the mentioned nine agencies that can run optimally. So that, ultimately policies in adaptive governance become a space to ensure that responsibility, participation, and collaboration become a more robust focus during and after disasters occur (Smith & Lawrence, 2018).

E. CONCLUSION

The condition of health facilities in the East Kutai Regency is good; the statement is based on the distribution of health facilities needed by the public health (Puskesmas) evenly in all sub-districts and the availability of four hospitals in the East Kutai Regency which are also the COVID-19 Referral Hospitals. The situation of the development of the COVID-19 pandemic in East Kutai Regency continues to increase recorded today East Kutai Regency is classified as an area with red zone status that is classified as an area with a high rate of COVID-19 transmission and occupies the fourth position of all districts/cities in East Kalimantan Province. The COVID-19 risk map released by the Central Government shows

the East Kutai Regency category of moderate risk by showing the area described as the color "Orange" on the map.

In realizing adaptive governance, the Government of East Kutai Regency has demonstrated cooperation in handling between agencies and all levels of society which is a form of adaptive governance implementation in disaster management. The government has widely carried out measures to prevent the spread and handling of COVID-19 and society's agencies and levels. The involvement of Task Force Teams at all levels, Police, Military District Command, Community Organizations, NGOs, and Companies in helping the prevention and handling of the COVID-19 pandemic run by the East Kutai District Health Office is a form of participation and collaboration in the handling of the COVID-19 pandemic health disaster.

With a small area scale, this study shows that the application of adaptive governance by prioritizing agility in responding to disaster crises through the resulting policies and cooperation between institutions and community components shows that this can be done well if it is implemented comprehensively in all sectors involved and affected. The limitations in this study only show how the adaptive governance values that have been presented in handling the COVID-19 pandemic in the East Kutai Regency are based on data from one party, namely the government so that in future research it will be more interesting if future researchers can present other perspectives through the point of view of the assessment of the community and other parties.

Contributorship

The first author contributed to formulating research ideas, conducting research, and analyzing the data-reduction findings that had been processed using NVivo-12 plus software. Furthermore, the second author contributed to processing the interview data in the NVivo 12 Plus software, displaying data, and discussing the results.

REFERENCES

- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Suswanta, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Queena Ns (Ed.); 01, Oktobe ed.). Pustaka Pelajar.
- Andrew, S., Salamonson, Y., & Halcomb, E. J. (2008). Integrating mixed methods data analysis using NVivo: An example examining attrition and persistence of nursing students. *International Journal of Multiple Research Approaches*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.5172/mra.455.2.1.36>
- Aoki, N. (2016). Adaptive governance for resilience in the wake of the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami. *Habitat International*, 52, 20–25. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.025>
- Arumanto, W. (2020). *Kutai Timur berlakukan isolasi bagi karyawan perusahaan usai cuti*. Kaltim.AntaraneWS.Com. <https://kaltim.antaraneWS.com/berita/74468/kutai-timur-berlakukan-isolasi-bagi-karyawan-perusahaan-usai-cuti>
- BPS Kutai Timur. (2019). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2019/2020. In *BPS Kutai Timur*.
- BPS Kutai Timur. (2021). Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2021. *BPS Kutai Timur*, 1, 1–404.
- Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.). *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Brunner, R. D. (2010). Adaptive governance as a reform strategy. *Policy Sciences*, 43(4),

- 301–341. <https://doi.org/10.1007/s11077-010-9117-z>
- Cahyanti, A. N., & Purnama, B. E. (2017). Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Pakis Baru Nawangan. *Speed Journal – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 4(4), 17–21. <https://doi.org/10.3112/SPEED.V4I4.893>
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3). <https://doi.org/10.5751/ES-06824-190356>
- Chen, E., Lerman, K., & Ferrara, E. (2020). Tracking social media discourse about the COVID-19 pandemic: Development of a public coronavirus Twitter data set. *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(2). <https://doi.org/10.2196/19273>
- Covid19.go.id. (2021). *Peta Risiko*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/peta-risiko>
- covid19.kaltimprov.go.id. (2021). *Kaltim Tanggap Covid-19*. Covid19.Kaltimprov.Go.Id. <https://covid19.kaltimprov.go.id/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=creswell+2013+qualitative+inquiry&ots=-ho47dMSSz&sig=GKzTi9tUg7a6jmbGaoDmFSPAsdg&redir_esc=y#v=onepage&q=creswell+2013+qualitative+inquiry&f=false
- DePaolo, C. A., & Wilkinson, K. (2014). Get Your Head into the Clouds: Using Word Clouds for Analyzing Qualitative Assessment Data. *TechTrends*, 58(3), 38–44. <https://doi.org/10.1007/s11528-014-0750-9>
- Djalante, R. (2012). Review Article: Adaptive Governance and resilience: The role of multi-stakeholder platforms in disaster risk reduction. *Natural Hazards and Earth System Science*, 12(9), 2923–2942. <https://doi.org/10.5194/nhess-12-2923-2012>
- DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur. (2021). *Gambaran Kutai Timur*. Dpmptsp.Kutaitimurkab.Go.Id. <https://dpmptsp.kutaitimurkab.go.id/profile-daerah/gambaran-kutai-timur>
- Edwards-Jones, A. (2014). Qualitative data analysis with NVIVO. *Journal of Education for Teaching*, 40(2), 193–195. <https://doi.org/10.1080/02607476.2013.866724>
- Grindle, M. S. (2004). Good enough Governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Handayani, S. (2016). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Baturetno. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.26576/profesi.135>
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119–124. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.119>
- Hasselman, L. (2017). Adaptive management; adaptive co-management; adaptive governance: what’s the difference? *Australasian Journal of Environmental Management*, 24(1), 31–46. <https://doi.org/10.1080/14486563.2016.1251857>
- Holley, C. (2010). Facilitating Monitoring, Subverting Self-Interest and Limiting Discretion: Learning from “New” Forms of Accountability in Practice. *Columbia Journal of Environmental Law*, 35(1), 127–211.
- Hong, S., & Lee, S. (2018). Adaptive governance and decentralization: Evidence from

- regulation of the sharing economy in multi-level governance. *Government Information Quarterly*, 35(2), 299–305. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.002>
- Huitema, D., Mostert, E., Egas, W., Moellenkamp, S., Pahl-Wostl, C., & Yalcin, R. (2009). Adaptive water governance: Assessing the institutional prescriptions of adaptive (co-)management from a governance perspective and defining a research agenda. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/ES-02827-140126>
- Hurlbert, M., & Gupta, J. (2016). Adaptive Governance, Uncertainty, and Risk: Policy Framing and Responses to Climate Change, Drought, and Flood. *Risk Analysis*, 36(2), 339–356. <https://doi.org/10.1111/risa.12510>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive Governance: Towards a stable, accountable, and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Norman, E., Romli, M., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149>
- Kementrian Kesehatan RI. (2020a). 136 Kabupaten/Kota Masuk Dalam Zona Kuning. Kemkes.Go.Id. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20062600002/136-kabupaten-kota-masuk-dalam-zona-kuning.html>
- Kementrian Kesehatan RI. (2020b). *Jubir COVID-19 : Kecepatan Tes Berdasarkan Gambaran Epidemiologi Tiap Daerah*. Kemkes.Go.Id. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20062000003/jubir-covid-19-kecepatan-tes-berdasarkan-gambaran-epidemiologi-tiap-daerah.html>
- Khan, M., Roy, P., Matin, I., Rabbani, M., & Chowdhury, R. (2021). An adaptive governance and health system response for the COVID-19 emergency. *World Development*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105213>
- Lei, Y., Liu, C., Zhang, L., Wan, J., Li, D., Yue, Q., & Guo, Y. (2015). Adaptive governance to typhoon disasters for coastal sustainability: A case study in Guangdong, China. *Environmental Science and Policy*, 54, 281–286. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.016>
- Loilatu, M. J., Irawan, B., Salahudin, S., & Sihidi, I. T. (2021). Analisis fungsi twitter sebagai media komunikasi transportasi publik. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 2021. <https://doi.org/10.24912/jk.v13i1.8707>
- Molenveld, A., & van Buuren, A. (2019). Flood risk and resilience in the Netherlands: In search of an adaptive governance approach. *Water (Switzerland)*, 11(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/w11122563>
- Muhtarom, Murtianto, Y. H., & Sutrisno. (2017). Thinking process of students with high-mathematics ability: (a study on QSR NVivo 11-assisted data analysis). *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(17), 6934–6940.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Pemkab. Kutai Timur. (2021). *Sejarah*. Kutaitimurkab.Go.Id. <https://www.kutaitimurkab.go.id/page/profile/1>

- Pratama, O. (2020). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Putsanra, D. V. (2020). *Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia*. <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT>
- Rijke, J., Brown, R., Zevenbergen, C., Ashley, R., Farrelly, M., Morison, P., & van Herk, S. (2012). Fit-for-purpose Governance: A framework to make adaptive governance operational. *Environmental Science and Policy*, 22, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.06.010>
- Ruane, S. (2020). Applying the principles of adaptive governance to bushfire management: a case study from the South West of Australia. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(7), 1215–1240. <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1648243>
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132. <https://doi.org/10.22146/jkn.56318>
- Saputra, H., & Salma, N. (2020). Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 282–292. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042>
- Sarita, M. (2020). *Lebih 500 Warga Kutai Timur Ikut Tes Swab Gratis di Mobile PCR*. Tribunkaltim.Co. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/11/25/lebih-500-warga-kutai-timur-ikut-tes-swab-gratis-di-mobile-pcr?page=2>
- Shahbudin, M. S. I. (2020). Kepanikan Pengguna Media Sosial Terhadap Virus Covid 19. *PENDETA Journal of Malay Language, Education, and Literature*, 11, 1–10. <http://ojs.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/3579>
- Smith, K., & Lawrence, G. (2018). From disaster management to adaptive governance? Governance challenges to achieving resilient food systems in Australia. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 20(3), 387–401. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1432344>
- Syafrida, S. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>
- Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- Telaumbanua, D. (2020). *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*. 12(1), 59–70.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Walch, C. (2019). Adaptive governance in the developing world: disaster risk reduction in the State of Odisha, India. *Climate and Development*, 11(3), 238–252. <https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1442794>
- Worldmeter. (2021). *Covid-19 Coronavirus Pandemic*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Wyborn, C. A. (2015). Connecting knowledge with action through coproductive capacities: Adaptive governance and connectivity conservation. *Ecology and Society*, 20(1). <https://doi.org/10.5751/ES-06510-200111>

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN
KARYA ILMIAH PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UNIVERSITAS MULAWARMANTAHUN 2021**

Penasehat : Dekan Fisip Unmul
Ketua : Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
Anggota : 1. Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si
2. Dr. Bambang Irawan, M.Si
3. Dr. Enos Paselle, MAP
4. Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D



MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2021

**PEDOMAN PENULISAN TESIS
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**